

**PENGARUH HUBUNGAN PIHAK EKSEKUTIF &  
LEGISLATIF, LATAR BELAKANG PENDIDIKAN,  
INDIKATOR KINERJA, DAN KOMITMEN ORGANISASI  
TERHADAP KURANGNYA KETEPATAN WAKTU  
PENYUSUNAN APBD  
(STUDI KASUS KABUPATEN WONOSOBO)**



**SKRIPSI**

**Karya Tulis sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi  
Jurusan Akuntansi**

**Disusun Oleh :**

**DEWI KURNIAWATI**

**NIM : 1A.08.1177**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
BANK BPD JATENG  
SEMARANG  
2012**

**PENGARUH HUBUNGAN PIHAK EKSEKUTIF &  
LEGISLATIF, LATAR BELAKANG PENDIDIKAN,  
INDIKATOR KINERJA, DAN KOMITMEN ORGANISASI  
TERHADAP KURANGNYA KETEPATAN WAKTU  
PENYUSUNAN APBD  
(STUDI KASUS KABUPATEN WONOSOBO)**



**SKRIPSI**

**Karya Tulis sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi  
Jurusan Akuntansi**

**Disusun Oleh :**

**DEWI KURNIAWATI**

**NIM : 1A.08.1177**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI**

**BANK BPD JATENG**

**SEMARANG**

**2012**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENGARUH HUBUNGAN PIHAK EKSEKUTIF & LEGISLATIF, LATAR  
BELAKANG PENDIDIKAN, INDIKATOR KINERJA, DAN KOMITMEN  
ORGANISASI TERHADAP KURANGNYA KETEPATAN WAKTU  
PENYUSUNAN APBD  
(STUDI KASUS KABUPATEN WONOSOBO)**

Disusun Oleh :

**DEWI KURNIAWATI**

**NIM : 1A.08.1177**

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi  
STIE Bank BPD Jateng

Semarang, Oktober 2012

Pembimbing I

Pembimbing II

Yohana Kus Suparwati, SE. MSi

NIDN. 0611056902

Mekani Vestari, SE, M.Si, Akt.

NIDN. 0016077401

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENGARUH HUBUNGAN PIHAK EKSEKUTIF & LEGISLATIF, LATAR  
BELAKANG PENDIDIKAN, INDIKATOR KINERJA, DAN KOMITMEN  
ORGANISASI TERHADAP KURANGNYA KETEPATAN WAKTU  
PENYUSUNAN APBD  
(STUDI KASUS KABUPATEN WONOSOBO)**

Disusun Oleh:

**DEWI KURNIAWATI**

NIM: 1A.08.1177

Dinyatakan diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi STIE Bank BPD  
Jateng pada tanggal

TIM PENGUJI

1. ....

NIDN:

2. ....

NIDN:

3. ....

NIDN:

TANDA TANGAN

.....

.....

.....

Mengesahkan,  
Ketua STIE Bank BPD Jateng

Dr. H. Djoko Sudantoko, S.Sos, M.M  
NIDN. 0607084501

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD menjadi fenomena dalam penganggaran pemerintah daerah di Indonesia. Fenomena ini dialami oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia. Jadwal penyusunan APBD yang dinyatakan melalui peraturan belum diterapkan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan empat faktor penyebab kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD. Faktor-faktor tersebut adalah (1) faktor hubungan eksekutif dan legislatif, (2) faktor latar belakang pendidikan, (3) faktor indikator kinerja dan (4) faktor komitmen organisasi. Metode sampling dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan sampel pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD di Kabupaten Wonosobo. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linear. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keempat faktor yang digunakan dalam penelitian ini memberikan pengaruh negatif terhadap kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD. Ukuran kebaikan model penelitian ini adalah 64,1%.

Kata kunci: kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD, faktor hubungan eksekutif dan legislatif, latar belakang pendidikan, indikator kinerja, komitmen organisasi.

## ABSTRACT

*This research aimed to determine the lateness of APBD preparation becomes a phenomenon in local government budgeting in Indonesia. The phenomenon is experienced by many local governments in Indonesia. Schedule of APBD preparation which is stated by regulations has not been applied yet by local governments. The result of this research showed that there are five factors causing lateness of APBD preparation. Those factors are (1) executive and legislative relationship factor, (2) educational background factor, (3) performance indicator factor and (4) commitment organisation factor. Sampling method in this study using purposive sampling with samples is who are involved of APBD preparation in the Wonosobo Regency. Analysis techniques used in this study is Linier Regression Analysis. The test results show that all of factor used in this research significant has a negative effect toward lateness of APBD preparation. Size of the goodness model of this study is 64,1%.*

*Keywords: lateness of APBD preparation, factor analysis executive and legislative relationship, educational background, performance indicator, commitment organisation.*

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini adalah saya,

Nama : Dewi Kurniawati

NIM : 1A.08.1177

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul **“PENGARUH HUBUNGAN PIHAK EKSEKUTIF & LEGISLATIF, LATAR BELAKANG PENDIDIKAN, INDIKATOR KINERJA, DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KURANGNYA KETEPATAN WAKTU PENYUSUNAN APBD (STUDI KASUS KABUPATEN WONOSOBO)”** telah saya susun dengan sebenar-benarnya dengan memperhatikan kaidah akademik dan menjunjung tinggi hak atas karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya unsur plagiasi maupun unsur kecurangan lainnya pada skripsi yang telah saya buat tersebut, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya dan saya siap menerima segala konsekuensi yang ditimbulkannya termasuk pencabutan gelar kesarjanaan yang telah diberikan kepada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Semarang, Oktober 2012

Dewi Kurniawati

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”*

*(Al-Baqarah: 153)*

*“Jadi diri sendiri, cari jati diri, dan mendapatkan hidup yang mandiri. Selalu optimis karena hidup terus mengalir dan kehidupan terus berputar. Sesekali meliat ke belakang untuk melanjutkan perjalanan yang tiada berujung”.*

*“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua”.*  
*(Aristoteles)*

*Skripsi ini ku persembahkan untuk:*

- *Bapak dan Ibu tercinta*
- *Kakakku tersayang*
- *Seseorang yang kupanggil “abang”*
- *Saudara dan sahabatku semua*

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Pengaruh Hubungan Pihak Eksekutif & Legislatif, Latar Belakang Pendidikan, Indikator Kinerja, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kurangnya Ketepatan Waktu Penyusunan APBD (Studi Kasus Kabupaten Wonosobo)”**.

Skripsi ini penulis susun, guna memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana (S1) pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jateng Jurusan Akuntansi.

Peran serta berbagai pihak turut menentukan terselesaikannya penulisan skripsi ini, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Djoko Sudantoko, S.Sos, MM. selaku Ketua STIE Bank BPD Jateng.
2. Ibu Nur Anissa, SE, M.Si, Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi STIE Bank Bpd Jateng.
3. Ibu Yohana Kus Suparwati. SE, M.Si. selaku Dosen Pembimbing pertama telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam rangka menyusun skripsi ini.
4. Ibu Mekani Vestari, SE, M.Si, Akt. selaku Dosen Pembimbing kedua yang juga telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam rangka menyusun skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen, baik Akuntansi maupun Manajemen STIE BANK BPD JATENG, terimakasih untuk ilmu dan pengetahuan yang diajarkan.
6. Ibu Yohana Kus Suparwati. SE, M.Si. selaku Dosen Wali yang membimbing penulis selama studi di STIE Bank BPD Jateng.
7. Ucapan terimakasih khususnya penulis ucapkan untuk bapak dan ibu tersayang, terimakasih untuk cinta, dukungan, dan doa kalian yang tidak pernah putus.

8. Kakakku Eliana Setyowati yang selalu mendukung dan membimbing ku hingga skripsi ini selesai.
9. Abang Mokhammad Gilang Aji Prasetya yang selalu memberikan semangat dan doanya selama pengerjaan skripsi ini.
10. Seluruh Dinas di Kabupaten Wonosobo yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner.
11. Sahabat-sahabatku Rhaudhatul Djannah, Widhi Enggar, Nur Fauziah, Riska Amalia, Rizki Agustin, Riska Vita, Tri Widowati, Kurnia Saktian, Dwi Purwanti, Dewi Setya Rini, Agung Priambodo, Aditya Candra, Soni, Niko, Andika Prakoso, Rikza Rahman, Sofa, Bagustina, Yoga Pamungkas, Irfan, Fanni, Gilang, Iqbal, semangat dari kalian sangat berarti untukku.
12. Teman-teman satu kos Arjuna 25.
13. Teman-teman Angkatan 2008 yang tidak dapat disebutkan satu per satu, semoga sukses semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang lebih baik. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca khususnya Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jateng.

Semarang, Oktober 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Judul Skripsi .....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Abstrak Bahasa Indonesia .....	iv
Abstrak Bahasa Inggris .....	v
Surat Pernyataan .....	vi
Halaman Motto dan Persembahan .....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	x
Daftar Tabel .....	xiv
Daftar Gambar .....	xv
Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Pembatasan Masalah .....	10
1.3. Perumusan Masalah .....	10
1.4. Tujuan Penelitian .....	10
1.5. Manfaat Penelitian .....	11
1.5.1 Manfaat Teoritis .....	11
1.5.2 Manfaat Praktis .....	11
1.6. Kerangka Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Tinjauan Pustaka .....	13
2.1.1. Konsep Anggaran Sektor Publik .....	13

2.1.2.	Pengertian Pemerintahan Daerah .....	13
2.1.3.	Pengertian APBD .....	14
2.1.4.	Pengertian Kurangnya Ketepatan Waktu Penyusunan APBD .....	16
2.1.5.	Faktor Penyebab Kurangnya Ketepatan Waktu Penyusunan APBD .....	16
2.1.6.	Hubungan Pihak Eksekutif dan Legislatif .....	18
2.1.7.	Latar Belakang Pendidikan .....	19
2.1.8.	Indikator Kinerja .....	19
2.1.9.	Komitmen Organisasi .....	20
2.2.	Pengembangan Hipotesis .....	20
2.2.1.	Hubungan Pihak Eksekutif dan Legislatif dan Kurangnya Ketepatan Waktu Penyusunan APBD .....	20
2.2.2.	Latar Belakang Pendidikan dan Kurangnya Ketepatan Waktu Penyusunan APBD .....	22
2.2.3.	Indikator Kinerja dan Kurangnya Ketepatan Waktu Penyusunan APBD .....	22
2.2.4.	Komitmen Organisasi dan Kurangnya Ketepatan Waktu Penyusunan APBD .....	23
2.3.	Model Penelitian .....	24
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>25</b>
3.1.	Definisi Konsep.....	25
3.1.1.	Kurangnya Ketepatan Waktu Penyusunan APBD ...	25
3.1.2.	Hubungan Eksekutif dan Legislatif .....	25
3.1.3.	Latar Belakang Pendidikan .....	26
3.1.4.	Indikator Kinerja .....	26
3.1.5.	Komitmen Organisasi .....	27

3.2. Definisi Operasional .....	27
3.3. Populasi dan Responden .....	28
3.4. Metode Pengumpulan Data .....	29
3.5. Metode Analisis Data .....	29
3.5.1 Validitas .....	29
3.5.2 Reliabilitas .....	30
3.5.3 Analisis Statistik Deskriptif .....	30
3.5.4 Analisis Regresi .....	31
3.5.5 Uji Asumsi Klasik .....	32
a. Uji Normalitas .....	32
b. Uji Heteroskedastisitas .....	32
c. Uji Glejser .....	33
d. Multikolinearitas .....	33
3.5.6 Uji Keباikan Model .....	34
a. Koefisien Determinasi .....	34
b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) .....	34
3.5.7 Pengujian Hipotesis (Uji t) .....	35
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK DAN</b>	
<b>HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
4.1. Gambaran Umum .....	37
4.1.1 Kabupaten Wonosobo .....	37
4.1.2 Deskripsi Responden .....	37
4.2. Hasil Analisis Data .....	40
4.2.1 Uji Validitas .....	40
4.2.2 Uji Reliabilitas .....	43
4.2.3 Analisis Statistik Deskriptif .....	44
4.2.4 Analisis Regresi Linier .....	45

4.2.5	Uji Asumsi Klsik .....	46
a.	Uji Normalitas .....	46
b.	Heteroskedastisitas .....	47
c.	Uji Glejser .....	48
d.	Multikolinearitas .....	49
4.2.6	Uji Kebaikan Model .....	50
a.	Koefisien Determinasi .....	50
b.	Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	50
4.2.7	Uji Hipotesis (Uji t) .....	51
4.3.	Analisis dan Pembahasan .....	52
4.3.1	Pengujian Hipotesis Pertama .....	52
4.3.2	Pengujian Hipotesis Kedua .....	53
4.3.3	Pengujian Hipotesis Ketiga .....	53
4.3.4	Pengujian Hipotesis Keempat .....	53
BAB V	PENUTUP .....	55
5.1.	Kesimpulan .....	55
5.2.	Keterbatasan.....	55
5.3.	Saran.....	55
5.4.	Implikasi .....	56

Daftar Pustaka

Lampiran

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Data Penetapan APBD .....	8
Tabel 3.1 : Definisi Operasional Variabel .....	27
Tabel 4.1 : Distribusi Responden .....	38
Tabel 4.2 : Deskripsi Responden .....	39
Tabel 4.3 : Hasil Uji Validitas Hubungan Pihak Eksekutif dan Legislatif .....	41
Tabel 4.4 : Hasil Uji Validitas Latar Belakang Pendidikan .....	41
Tabel 4.5 : Hasil Uji Validitas Indikator Kinerja .....	42
Tabel 4.6 : Hasil Uji Validitas Komitmen Organisasi .....	42
Tabel 4.7 : Hasil Uji Validitas Kurangnya Ketepatan Waktu Penyusunan APBD .....	43
Tabel 4.8 : Hasil Uji Reliabilitas .....	43
Tabel 4.9 : Statistik Deskriptif .....	44
Tabel 4.10 : Hasil Regresi Linier .....	45
Tabel 4.11 : Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov .....	47
Tabel 4.12 : Hasil Uji Glejser .....	49
Tabel 4.13 : Hasil Uji Multikolinieritas .....	49
Tabel 4.14 : Hasil Koefisien Determinasi .....	50
Tabel 4.15 : Hasil Uji – F .....	51
Tabel 4.16 : Hasil Uji – t .....	51

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Kerangka Penelitian .....	12
Gambar 2.1 : Model Penelitian .....	24
Gambar 4.2 : Grafik Normal p-p plot .....	46
Gambar 4.2 : Grafik Scatter Plot .....	48

STIE BPD Jateng

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	Kuesioner
LAMPIRAN 2	Hasil Kuesioner
LAMPIRAN 3	Tabel Validitas (R Product Moment)
LAMPIRAN 4	Hasil Validitas dan Reliabilitas
LAMPIRAN 5	Hasil Uji Normalitas (Normal P-Plot)
LAMPIRAN 6	Hasil Uji Heteroskedastisitas (Scatter Plot) dan Uji Glejser
LAMPIRAN 7	Hasil Uji Multikolinearitas
LAMPIRAN 8	Hasil Regresi Linier
LAMPIRAN 9	Surat Keterangan
LAMPIRAN 10	Daftar Riwayat Hidup

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi dan kepercayaan yang telah melanda Indonesia memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi usaha peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Krisis tersebut membawa dampak luar biasa pada tingkat kemiskinan, namun di sisi lain memberikan berkah tersembunyi bagi upaya peningkatan taraf hidup seluruh rakyat di masa yang akan datang karena krisis tersebut membuka jalan bagi munculnya reformasi di seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia (Indrijawati, 2008).

Menurut Werimon *et al* (2007), terjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik. Akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk, berdampak pada krisis ekonomi dan krisis kepercayaan serta mengarah pada reformasi.

Reformasi yang terjadi di Indonesia telah bergulir selama lebih dari satu dasawarsa dan hal itu menandakan pula bahwa pelaksanaan otonomi dalam penyelenggaraan pemerintah juga telah lama dilakukan. Tema sentral reformasi total adalah mewujudkan masyarakat madani, terciptanya *good governance* dan pembangunan yang berkeadilan dan paradigma di berbagai bidang kehidupan (Ariesta dan Ritonga, 2010). Perubahan sistem politik, sosial, dan kemasyarakatan serta ekonomi yang dibawa oleh arus reformasi telah menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintah yang baik (*good government governance*). Tuntutan ini perlu dipenuhi dan disadari langsung oleh para manajer pemerintahan daerah. Seiring dengan PP No 105/2000 yang diganti menjadi PP No. 58/2005 mensyaratkan perlu diberlakukannya pertanggungjawaban

(akuntabilitas) dalam bentuk laporan keuangan (neraca daerah, arus kas, dan realisasi anggaran) oleh kepala daerah (Coryanata, 2007).

Reformasi yang diperjuangkan oleh seluruh lapisan masyarakat membawa perubahan dalam kehidupan politik nasional maupun di daerah. Salah satu agenda reformasi tersebut adalah adanya desentralisasi keuangan dan otonomi daerah. Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor/XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pemerintah telah mengeluarkan satu paket kebijakan tentang otonomi daerah yaitu: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi UU No.33 Tahun 2004 menjadi tonggak awal dari otonomi daerah (Coryanata, 2007).

Adanya otonomi menjadi salah satu bentuk perubahan dari adanya reformasi dalam bidang pemerintahan. Otonomi adalah bentuk dari hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah daerah untuk mengurus urusan terkait pemerintahan dan kepentingan masyarakat secara otonom sesuai dengan peraturan. Pengertian tersebut memperlihatkan bahwa keterlibatan pemerintah daerah dalam menjalankan urusan daerah semakin besar bila dibandingkan di masa sebelum otonomi (Ariesta dan Ritonga, 2010)

Seperti dikemukakan oleh Ritonga (2009), UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI tahun 1945. Hal tersebut sangat berimplikasi pada perubahan dalam sistem pembuatan keputusan terkait dengan pengalokasian sumber daya dalam anggaran pemerintah daerah seperti APBD dan hubungan legislatif dan eksekutif di daerah. Lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi umum yaitu: (1) fungsi legislatif (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), (2) fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun

anggaran), dan (3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif).

Norsain (2010) mengungkapkan bahwa para legislator dan eksekutif seperti tidak punya tanggung jawab moral untuk menyelesaikan APBD tepat sesuai dengan jadwal. Dua pilar penting yakni eksekutif dan legislatif itu tampak tak punya greget untuk segera menyelesaikan tanggung jawab menegakkan anggaran daerah. Keduanya lebih banyak melontarkan wacana ke publik yang tidak ada relevansinya dengan penyelesaian anggaran menjadi sebuah peraturan daerah (perda). Patut dipertanyakan, kalau penetapan anggaran daerah yang merupakan kegiatan rutin saja tidak bisa diselesaikan tepat waktu, bagaimana nasib penyelesaian kebijakan lainnya?

Semua alasan yang mengemuka itu, bisa dikategorikan menjadi dua penyebab kurangnya ketepatan waktu penyelesaian APBD, yakni persoalan teknis yang meliputi penyiapan rancangan dan pemenuhan standarnya, serta persoalan moral yang mencakup kedisiplinan lembaga legislatif yang lebih mengedepankan kepentingan partai, kelompok, atau golongan ketimbang mengutamakan kepentingan masyarakat di daerahnya. Persoalan pertama yang menyangkut teknis, seperti kemampuan eksekutif dalam menyiapkan rancangan, memang cukup serius. Ganjalan kedua yang menghambat penyelesaian APBD adalah persoalan moral, baik di kalangan eksekutif maupun legislatif (Norsain, 2010).

Pramita dan Andriyani (2010) menyatakan bahwa otonomi yang luas, nyata, bertanggungjawab membawa perubahan pada pola dan sistem pengawasan dan pemeriksaan. Perubahan pada pola pengawasan terkait dengan diberinya keleluasaan kepada pemda untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 132, menyatakan DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD.

Dampak lain yang kemudian muncul dalam rangka otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan *good governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan pemerintah dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi diperlukan *internal control* dan *eksternal control* yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka peran dari dewan menjadi semakin meningkat dalam mengontrol kebijaksanaan pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa: (1) Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, (2) Dewan berwenang memerintahkan pemeriksa eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran (Coryanata, 2007).

Kinerja dewan dalam menjalankan fungsi legislasinya masih selalu menjadi perhatian khusus masyarakat karena dipercayakannya amanah pada anggota dewan untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi, kepercayaan tersebut sekarang ini cenderung berkurang bahkan banyak yang tidak mempercayai kinerja dewan, hal ini disebabkan karena kinerja dewan yang kurang optimal dan belum ada komitmen organisasi yang kuat dari para anggota dewan. Diharapkan DPRD melalui dewan akan lebih aktif menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik di daerah bersama-sama Kepala Daerah (Bupati atau Walikota). (Pramita dan Andriyani, 2010).

Menurut UU 33/2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, APBD adalah rencana keuangan yang dibuat pemerintah daerah secara tahunan melalui pembahasan dan persetujuan antara DPRD dan pemerintah daerah dan kemudian disahkan dalam peraturan daerah. Penyusunan APBD oleh setiap daerah di Indonesia menjadi wujud penyelenggaraan otonomi yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah melalui penyusunan anggaran. APBD setiap tahunnya disusun oleh pemerintah daerah dan untuk mendukung penyusunan APBD pemerintah pusat menerbitkan

peraturan yang menjadi landasan dalam menyusun APBD. Salah satunya aturan yang diterbitkan tersebut adalah Permendagri 13/2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan aturan tersebut telah diuraikan jadwal dalam menyusun APBD yang berlaku bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia (Ariesta dan Ritonga, 2010).

Adanya aturan yang berisikan jadwal tersebut belumlah mampu untuk mengatasi fenomena yang tengah terjadi dalam penyusunan APBD di Indonesia. Fenomena tersebut turut menggelitik perhatian karena fenomena ini terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia. Fenomena tersebut adalah terjadinya kurangnya ketepatan waktu dalam penyusunan APBD. Kurangnya ketepatan waktu dalam penyusunan APBD ini telah terjadi dalam kurun waktu yang lama, bahkan di masa reformasi banyak pemerintah daerah yang masih terlambat dalam menyusun APBD. APBD yang mengalami kurangnya ketepatan waktu dalam penyusunan tersebut merupakan APBD yang terlambat ditetapkan atau disahkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD sebelum atau saat 31 Desember (Norsain, 2010).

Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi, dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik (Mardiasmo, 2009).

Proses paling genting dalam konteks politik yang berhubungan dengan produk politik adalah upaya untuk membuat keputusan guna menyelesaikan suatu fenomena atau gejala sosial ekonomi yang muncul. Pengambilan keputusan tentu saja berproses panjang. Proses inipun, pengambilan keputusan menyertakan mekanisme lobi, negosiasi, adu-argumen, hingga konflik yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang harus diakomodasi dalam produk politik yang dihasilkan (Norsain, 2010).

Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh

dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari luar terhadap fungsi pengawasan oleh dewan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, diantaranya adalah adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik (Pramono, 2002 dalam Coryanata, 2007).

APBD yang terlambat dalam proses penyusunannya dapat berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Hal tersebut terjadi karena ketika APBD terlambat ditetapkan melebihi 31 Desember, maka di masa APBD belum disahkan maka aliran dana dari sektor pemerintah akan terhambat dan itu memberikan pengaruh pada aliran uang atau transaksi di daerah dan pada akhirnya perekonomian daerah turut merasakan dampak dengan adanya kelesuan ekonomi (Ariesta dan Ritonga, 2010).

Seperti dikemukakan oleh KPK (2008) dalam Norsain (2010), bahwa APBD yang terlambat disahkan oleh pemerintah daerah dan DPRD dapat pula memberi peluang munculnya korupsi. Peluang korupsi tersebut dapat muncul dikarenakan adanya usaha untuk mengalihkan dana yang tersisa dari pelaksanaan program APBD ke dalam rekening pribadi. Dana yang tersisa berasal dari dana yang seharusnya digunakan untuk program pemerintah dari bulan Januari sampai Desember, namun karena adanya kurangnya ketepatan waktu maka dana tidak dapat digunakan secara penuh dan akan menghasilkan sisa dana. Pengalihan sisa dana ke rekening pribadi tersebutlah yang disebut dengan korupsi dan pada akhirnya dampak yang muncul dari kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD tersebut hanya akan merugikan masyarakat. Dalam penelitian sebelumnya faktor-faktor yang digunakan adalah pihak eksekutif dan legislatif, latar belakang pendidikan, indikator kinerja, komitmen organisasi dan penyusun APBD. Namun, dalam penelitian ini penyusun APBD tidak diikutsertakan dikarenakan penilaiannya sama-sama mengacu pada latar belakang pendidikan yang berhubungan dengan kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia.

Menurut KPK (2008) dalam Ariesta dan Ritonga (2010), diketahui bahwa pada tahun 2005 dari 33 provinsi di Indonesia sebagian besar provinsi terlambat dalam mengesahkan APBD, yakni sebanyak 28 provinsi. Lalu sisanya sebanyak 5 provinsi mengesahkan APBD sesuai jadwal, yaitu tidak melebihi minggu pertama bulan Oktober. Selain itu, diketahui pula kurangnya ketepatan waktu dalam penyusunan APBD juga terjadi di tahun 2009. Berdasarkan data yang diperoleh dari Seknas Fitra (2010) dalam salah satu websitenya [www.seknasfitra.org](http://www.seknasfitra.org) diketahui bahwa penetapan perda APBD untuk tahun 2009 sebanyak 44 daerah atau 8,62% menetapkan APBD melebihi 31 Desember. Sebanyak 68,24% atau 348 daerah ditetapkan dalam kurun waktu awal bulan Oktober – 31 Desember dan 23,14% atau 118 daerah telah menetapkan APBD sesuai jadwal. Informasi yang tersaji tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia mengalami kurangnya ketepatan waktu dalam penyusunan APBD dengan ditandai terlambatnya penetapan perda APBD.

Seperti telah disebutkan di atas bahwa masih banyak daerah-daerah yang mengalami kurangnya ketepatan waktu dalam penyusunan APBD, salah satunya adalah Wonosobo yang menetapkan APBD melebihi 31 Desember sesuai data yang diperoleh dari Seknas Fitra (2010) maka peneliti ingin melakukan penelitian di Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah Wonosobo. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang di timur, Kabupaten Purworejo di selatan, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara di barat, serta Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal di utara. Sebagian besar wilayah Kabupaten Wonosobo merupakan dataran tinggi dan pegunungan maka dari itu sebagian besar penduduknya memenuhi kebutuhannya dengan bertani dan berkebun. Tembakau merupakan salah satu hasil perkebunan yang menjadi andalan bagi penduduk Wonosobo. Dan dari situ pula salah satu sumber APBD berasal.

Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah harus terus ditingkatkan, selaras dengan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan

untuk lebih mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab. Pembangunan daerah harus dilaksanakan secara terpadu dan serasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta secara bersama-sama mewujudkan keharmonisan dan keseimbangan pembangunan nasional, mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Data berikut ini menunjukkan keterlambatan penetapan APBD di kabupaten Wonosobo:

**Tabel 1.1**  
**Data Penetapan APBD**

No.	APBD	Penetapan	Keterlambatan
1.	2009	07 Februari 2009	98 hari
2.	2010	09 Februari 2010	100 hari
3.	2011	24 Maret 2011	4 bulan lebih

Sumber data: Sekretaris Dewan Kabupaten Wonosobo

Ariesta dan Ritonga (2010) melakukan penelitian tentang kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD. Penelitian tersebut melibatkan beberapa faktor yang diduga berpengaruh. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor hubungan eksekutif dan legislatif, faktor latar belakang pendidikan, faktor indikator kinerja, faktor komitmen dan faktor penyusun APBD. Dan penelitian tersebut memberikan hasil bahwa kelima faktor tersebut secara keseluruhan memberikan pengaruhnya terhadap kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD sebesar 70,983% dan sisanya 29,017% dipengaruhi oleh faktor lainnya.

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Sopanah dan Mardiasmo (2003) dalam Pramita, Yulinda Devi dan Andriyani, Lilik (2010), dan hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD. Pengaruh yang ditunjukkan adalah positif artinya semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan kurangnya ketepatan waktu penyusunan yang dilakukan semakin meningkat. Disamping itu, interaksi pengetahuan anggaran

dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD yang dilakukan oleh dewan. Sedangkan interaksi pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan kurangnya ketepatan waktu pengawasan yang dilakukan oleh dewan.

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Rosseptalia (2006). Melibatkan faktor pengetahuan dewan tentang anggaran. Hasilnya bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan kurangnya ketepatan waktu penyusunan anggaran yang dilakukan oleh dewan.

Peneliti berikutnya Werimon *et.al* (2007) meneliti pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan APBD. Dalam penelitian ini pengetahuan Dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik dijadikan sebagai variabel Independen, dan pengawasan APBD dijadikan sebagai variabel dependen. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Pengetahuan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD, namun interaksi antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh negatif signifikan terhadap pengawasan APBD, interaksi pengetahuan Dewan dengan transparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD, Interaksi antara pengetahuan Dewan terhadap anggaran dengan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD.

Setelah diidentifikasi faktor-faktor penyebab tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat dalam penyusunan APBD berikutnya sehingga penyusunan APBD bisa tepat waktu. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti mengambil judul **“PENGARUH HUBUNGAN PIHAK EKSEKUTIF & LEGISLATIF, LATAR BELAKANG PENDIDIKAN, INDIKATOR KINERJA DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KURANGNYA KETEPATAN WAKTU PENYUSUNAN APBD (STUDI KASUS KABUPATEN WONOSOBO)”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Apakah hubungan pihak eksekutif dan legislatif berpengaruh negatif terhadap kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD?
- 1.2.2 Apakah latar belakang pendidikan berpengaruh negatif terhadap kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD?
- 1.2.3 Apakah indikator kinerja berpengaruh negatif terhadap kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD?
- 1.2.4 Apakah komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji apakah ada pengaruh hubungan pihak eksekutif dan legislatif terhadap kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD.
2. Untuk menguji apakah ada pengaruh latar belakang pendidikan terhadap kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD.
3. Untuk menguji apakah ada pengaruh indikator kinerja terhadap kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD.
4. Untuk menguji apakah ada pengaruh komitmen organisasi terhadap kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan sebuah penelitian, seorang peneliti pasti ingin mendapatkan manfaat dari penelitiannya tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperkuat hasil penelitian serta memberikan gambaran informasi dalam kajian berikutnya khususnya dalam penyusunan APBD.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

##### 1. Bagi Para Anggota DPRD

Sebagai bahan evaluasi kinerja yang dapat mengukur sampai sejauh mana tingkat penyusunan APBD yang dilakukan oleh anggota dewan guna mencapai pemerintah yang baik (*Good Governance*)

##### 2. Bagi Pemerintah Daerah

Dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk mencapai pemerintahan yang menuju *Good Governance* guna dapat menjalankan pemerintahan yang bersih serta sebagai salah satu cara untuk pencapaian otonomi daerah yang optimal dalam hal penyusunan APBD.

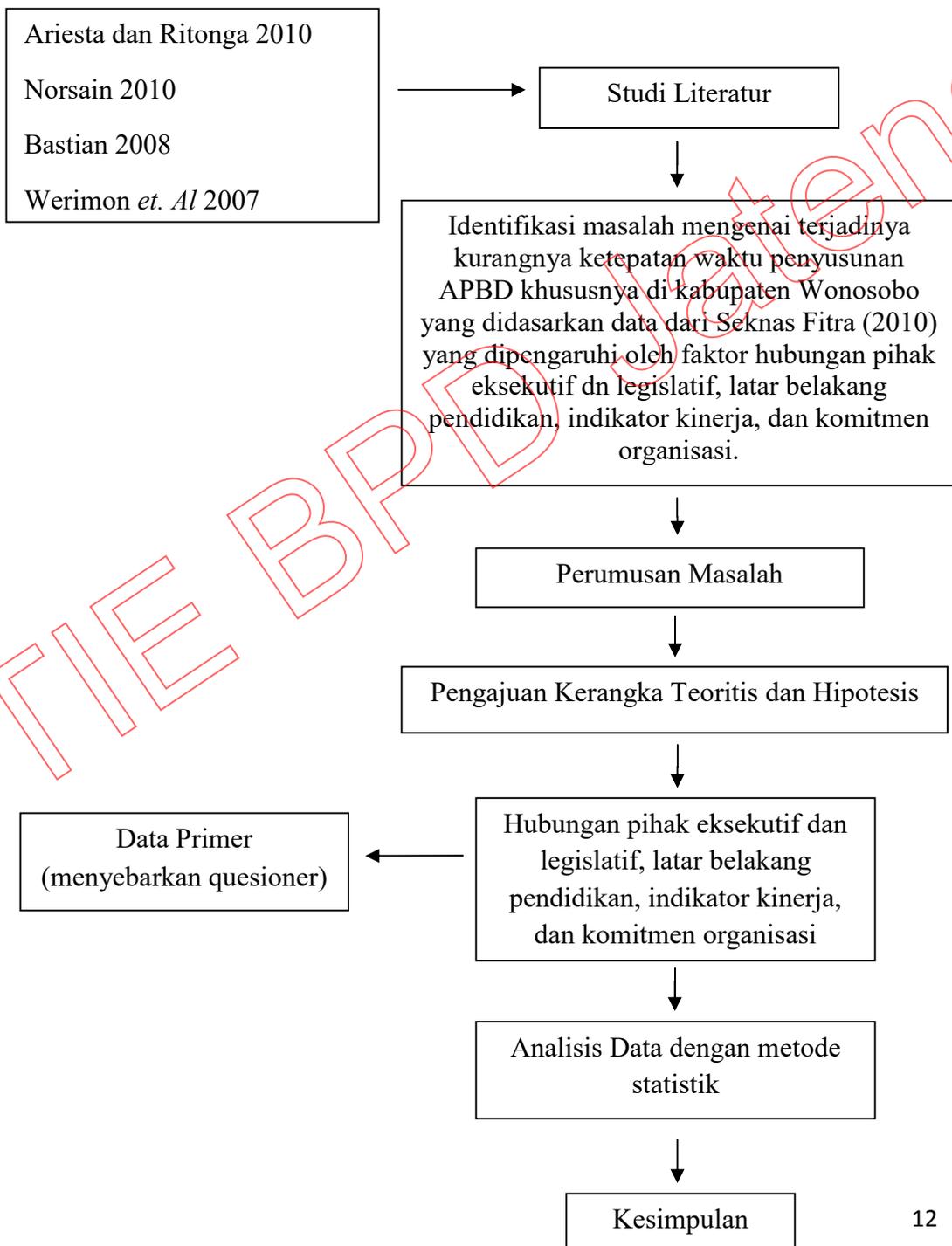
##### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat membantu peneliti lain yang membutuhkan informasi yang sama dan dapat berguna untuk penelitian lain yang berhubungan dengan penyusunan APBD.

## 1.5 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian ini berisi bagan yang menjelaskan proses atau alur penelitian yang dilakukan, dimulai dari studi pendahuluan hingga penarikan kesimpulan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Penelitian**



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Konsep Anggaran Sektor Publik**

Menurut Mardiasmo (2002) dalam Utomo (2011), anggaran pemerintahan merupakan biaya atas rencana yang dibuat dan berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana. Jadi anggaran merupakan suatu kerangka konseptual yang disusun dalam satu periode tertentu yang dipersiapkan untuk mencapai tujuan dari pemerintah.

Proses penyusunan anggaran pemerintahan terdapat 4 faktor penting yang menjadi landasan utama yaitu: (1) tujuan dan target yang hendak dicapai, (2) ketersediaan sumber daya, (3) waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target, (4) faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran. Penyusunan anggaran dalam sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dalam pembuatannya karena mengandung aspek politis sehingga dalam penyusunannya terdapat kepentingan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga dapat dikategorikan sebagai proses politik antara kedua belah pihak dan bukan hanya proses ekonomi. Berbeda sekali dalam penyusunan anggaran dalam perusahaan swasta dimana dalam penyusunannya tidak terdapat kaitan politis. Bagi perusahaan swasta penyusunan anggaran sangatlah tertutup bagi publik dan merupakan rahasia, sedangkan dalam sektor publik transparansi dalam penyusunan anggaran sangat diperlukan untuk menginformasikan kepada publik untuk dikritik dan memberikan saran (Utomo, 2011).

##### **2.1.2 Pengertian Pemerintahan Daerah**

Dalam pola hubungan eksekutif dan legislatif, khususnya dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dikenal beberapa istilah ketentuan umum dan penjelasan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah yaitu: pemerintahan daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kepala daerah adalah kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, pemilihan tersebut dengan mengingat tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-Undang 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan antara lain bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka pemilihan secara demokratis langsung dilakukan oleh rakyat sesuai dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Rahman, 2007).

### **2.1.3 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

APBD merupakan kependekan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun yang telah disetujui oleh anggota DPRD (Dewan perwakilan Rakyat Daerah).

APBD terdiri atas:

- *Anggaran pendapatan*, terdiri atas :
  - Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain
  - Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus
  - Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
- *Anggaran belanja*, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
- *Pembiayaan*, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

### **Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :**

- Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.
- Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah.
- Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Fungsi stabilitasi memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Menurut Halim dan Abdullah (2006) dalam Arniati *et al* (2010), sebelum penyusunan APBD dilakukan, terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang arah dan kebijakan umum (AKU) dan prioritas anggaran, yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan AKU dan prioritas anggaran, yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

#### **2.1.4 Pengertian kurangnya ketepatan waktu APBD**

Kurangnya ketepatan waktu APBD merupakan penyerahan RAPBD yang melewati batas waktu yang ditentukan yaitu minggu pertama bulan Oktober (pasal 104 ayat 11 permendagri 59/2007). APBD yang mengalami kurangnya ketepatan waktu dalam penyusunan tersebut merupakan APBD yang terlambat ditetapkan atau disahkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD sebelum atau saat 31 Desember.

Menurut Abdullah (2011), secara normatif APBD sudah harus ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah (Perda) paling lambat pada 31 Desember. Namun, sebaiknya sudah di-perda-kan per 30 November, sehingga ada waktu selama sebulan (bulan Desember) untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan APBD pada tahun berkenaan. Misalnya, untuk mempersiapkan anggaran kas dan DPA-SKPD, serta SPD (Surat Penyediaan Dana), sehingga per 2 Januari sudah bisa dilakukan pencairan untuk uang persediaan (UP).

Kurangnya ketepatan waktu pengesahan APBD tentu menjadi sinyal jelek bagi pergerakan ekonomi daerah setempat sebab APBD merupakan salah satu stimulus penting bagi pertumbuhan perekonomian daerah. Selain itu, APBD yang disusun dan diserahkan tepat waktu, membuat pencairan anggaran juga tepat waktu, dan, akan bermuara kepada ketepatan sinergi para pelaku ekonomi (Bastian, 2007).

#### **2.1.5 Faktor penyebab kurangnya ketepatan waktu APBD**

Kurangnya ketepatan waktu pengesahan APBD dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya:

1. Kurangnya ketepatan waktu dalam penyusunan KUA/PPAS dan RAPBD, sehingga terlambat disampaikan kepada DPRD oleh Kepala Daerah.
2. DPRD tidak melaksanakan fungsi anggarannya dengan baik, yakni membahas dan memberikan persetujuan terhadap KUA/PPAS dan

RAPBD. Padahal persetujuan ini menjadi kunci dapat tidaknya proses penyusunan anggaran dilanjutkan ke tahap berikutnya.

3. Alasan politik, yakni adanya pertentangan politis antara sebagian anggota DPRD dengan Kepala Daerah. Hal ini terkadang sama sekali tidak berhubungan dengan proses penyusunan APBD, namun dilaksanakan untuk menjadi penghambat untuk pengesahan APBD.
4. Kurangnya ketepatan waktu evaluasi oleh Provinsi.

Ketika APBD terlambat diperdakan, maka yang dirugikan adalah semua pihak. Kurangnya ketepatan waktu itu hanyalah menimbulkan kerugian dan dampak yang paling besar dirasakan oleh masyarakat. Kurangnya ketepatan waktu yang terjadi rata-rata disebabkan oleh kurangnya ketepatan waktu pengesahan DPRD dan evaluasi pemerintahan di level atasnya.

Pemerintah pusat, dalam hal ini Ditjen Perimbangan Keuangan – Kemenkeu, berupaya untuk menurunkan angka kurangnya ketepatan waktu dengan salah satunya menunda penerimaan DAU daerah yang mengalami kurangnya ketepatan waktu pengesahan APBD hingga bulan April tahun berikutnya. Hal ini berlaku mulai tahun 2007 hingga sekarang dan tentu saja didasari oleh UU 32/2004, UU 33/2004 dan peraturan pelaksanaannya. Dampak dari upaya tersebut dapat dirasakan beberapa tahun ke depan, dimana tingkat kurangnya ketepatan waktu menurun secara drastis, artinya APBD akan disahkan paling lambat bulan April tahun berikutnya. Kurangnya ketepatan waktu memang tidak dapat dihindarkan karena beberapa hal:

1. Proses pertanggungjawaban APBD belum dapat dilaksanakan sebelum anggaran berakhir, ini dikarenakan banyaknya kegiatan yang belum dapat diselesaikan tepat waktu. jika proses dimulai pada akhir desember, maka dapat dipastikan APBD baru disahkan tahun berikutnya.
2. Terkait dengan poin no 1. pemda masih belum menerapkan akuntansi berbasis akrual seperti yang diamanatkan oleh pasal 36 UU 17/2003 sehingga

proses pertanggungjawaban seolah-olah menunggu kegiatan selesai dilaksanakan (basis kas).

3. Ketidaksiapan SDM dan fasilitas pendukung untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang dapat berubah setiap waktu. sementara yang satu belum dilaksanakan dengan sempurna sudah muncul peraturan yang menyebabkan perubahan sistem yang berbeda.
4. Yang terakhir dan paling penting adalah masih adanya kepentingan yang mengikuti pengesahan APBD sehingga pembahasan KUA dan PPAS sangat alot, walaupun terkesan benar tapi hal ini mungkin tidak terdapat di setiap daerah.

#### **2.1.6 Hubungan Pihak Eksekutif dan Legislatif**

Eksekutif adalah salah satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum. Figur paling senior dalam sebuah cabang eksekutif disebut kepala pemerintahan. Eksekutif dapat merujuk kepada administrasi, dalam sistem presidensiil, atau sebagai pemerintah, dalam sistem parlementer.

Legislatif adalah badan yang anggotanya dianggap sebagai perwakilan dari rakyat yang bertugas untuk membuat hukum atau peraturan. Definisi legislatif/parlemen itu sendiri yang diartikan sebagai suatu tempat dimana secara formal masalah-masalah kemasyarakatan dibahas oleh anggota masyarakat (Rahman, 2007).

Ada beberapa perubahan dalam hubungan antara eksekutif dengan legislatif. *Pertama*, eksekutif bersama dewan mempunyai otonomi penuh untuk membuat kebijakan-kebijakan lokal; dan *kedua*, anggota dewan memiliki otonomi penuh dan mempunyai peluang besar dalam proses legislasi. Kewenangan dewan dalam membuat kebijakan tidak terbatas hanya dalam memilih kepala daerah, tetapi juga berwenang membuat undang-undang, pengawasan, investigasi, dan bersama-sama dengan eksekutif menyusun APBD yang sebelumnya tidak pernah dilakukan (Wahyudi dan Sopanah, 2007).

Hubungan eksekutif dan legislatif merupakan komunikasi yang terjalin antara pihak eksekutif dan legislatif yang bisa memberikan pengaruh terhadap penyusunan APBD (artikel-media.blogspot.com/2009). Semakin baik hubungan kedua belah pihak semakin kecil kesalahan yang terjadi dalam penyusunan APBD, begitu juga sebaliknya.

### **2.1.7 Latar Belakang Pendidikan**

John Dewey berpendapat bahwa pendidikan adalah proses tanpa akhir. Pendidikan merupakan proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir (daya intelektual) maupun daya emosional (perasaan) yang diarahkan kepada tabiat manusia dan kepada sesamanya. Van Cleve Morris berpendapat bahwa pendidikan adalah studi filosofis yang pada dasarnya bukan hanya alat untuk mengalihkan cara hidup secara menyeluruh kepada setiap generasi, melainkan juga merupakan agent (lembaga) yang berugas melayani hati nurani masyarakat dalam perjuangannya mencapai hari yang lebih baik.

Dengan memperhatikan latar belakang pendidikan dari perangkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka akan berhubungan dengan tingkat pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sehingga akan membantu dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Sejalan dengan hal tersebut menurut Menpan (2006) “Tingkat Pendidikan Birokrasi Negara Indonesia sebgaiian besar berpendidikan SLTA ke bawah dan rendah tingkat pendidikan ini sangat mempengaruhi inovasi dan kreatifitasnya dalam mengambil keputusan”. Hal ini tentu sangat memprihatikan di mana seharusnya dalam penyusunan laporan keuangan dibutuhkan sumber daya yang benar-benar berkualitas.

### **2.1.8 Indikator Kinerja**

Indikator kinerja adalah merupakan kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja. Dalam menyusun indikator kinerja perlu ditentukan data apa saja yang mesti dikumpulkan, hal ini untuk mengetahui apakah kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan bila dibandingkan terhadap hasil perencanaan yang hendak dicapai dapat terpenuhi. Jadi indikator-indikator kinerja

merupakan alat yang sangat dibutuhkan untuk melihat apakah suatu strategi, program, atau kegiatan berhasil/gagal dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan (Susanto, 2009).

### **2.1.9 Komitmen Organisasi**

Komitmen organisasi adalah sebagai suatu keadaan dimana seseorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Menurut Stephen P. Robbins didefinisikan bahwa keterlibatan pekerjaan yang tinggi berarti memihak pada pekerjaan tertentu seseorang individu, sementara komitmen organisasional yang tinggi berarti memihak organisasi yang merekrut individu tersebut (Wikipedia, 2011).

Menurut L. Mathis-John H. Jackson dalam Wikipedia (2011), komitmen organisasi adalah tingkat sampai dimana karyawan yakin dan menerima tujuan organisasional. Serta berkeinginan untuk tinggal bersama atau meninggalkan perusahaan pada akhirnya tercermin dalam ketidakhadiran.

Menurut Griffin dalam Wikipedia (2011), komitmen organisasi (organisational commitment) adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana seseorang individu mengenal dan terikat pada organisasinya. Seseorang individu yang memiliki komitmen tinggi kemungkinan akan melihat dirinya sebagai anggota sejati organisasi.

## **2.2 Pengembangan Hipotesis**

Hipotesis didefinisikan sebagai pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga harus diuji secara empiris (Iqbal Hasan, 2004 dalam Wulandari, 2009).

### **2.2.1 Hubungan Pihak Eksekutif dan Legislatif terhadap Kurangnya ketepatan waktu Penyusunan APBD**

Tahapan penyusunan APBD diwarnai dengan hubungan yang tercipta antara eksekutif dan legislatif karena dalam penyusunan APBD kedua pihak tersebut berperan dan menunjukkan kesepakatan maupun kerja sama untuk

mencapai tujuan yang diharapkan. Hubungan yang baik dan selaras dapat mendorong penyusunan APBD yang efektif dan efisien. Namun, bila sebaliknya hubungan APBD tidak berjalan dengan baik dapat berpengaruh buruk pada penyusunan APBD. Salah satu bentuk hubungan yang berpengaruh pada penyusunan APBD adalah hubungan keagenan (Ariesta dan Ritonga, 2010).

Teori keagenan apabila dihubungkan dengan sektor publik berarti masyarakat berperan sebagai pemberi amanah sekaligus sebagai pemilik (*owner*) dan pelanggan (*customer*). Pemerintah Daerah dan DPRD dengan peran dan fungsinya sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat (*civil service*) atau dengan kata lain sebagai manajemen. Dalam organisasi sektor publik, pemerintah daerah/Pemda berperan sebagai agen dan publik/masyarakat berperan sebagai *prinsipal* yang memberikan otoritas kepada DPRD untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah (Rosalina, 2012).

Hubungan keagenan memperlihatkan adanya prinsipal dan agen serta terjadinya pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang memiliki empat ciri sebagaimana dinyatakan oleh Lupia dan McCubbins (2000) dalam Halim dan Abdullah (2006), yakni terjadi informasi asimetrik, adanya prinsipal maupun agen, timbul konflik kepentingan, dan adanya usaha prinsipal untuk mengurangi masalah keagenan. Ciri-ciri pada pendelegasian tersebut secara tidak langsung dapat menjadi ciri dari hubungan keagenan yang terjadi antar eksekutif dan legislatif serta dapat ditemukan dalam penyusunan APBD.

Hubungan eksekutif dan legislatif yang tidak selaras dan lebih mengarah pada keagenan merupakan salah satu faktor penyebab kurangnya ketepatan waktu dalam penyusunan APBD. Hubungan tersebut menghambat proses penyusunan APBD yang efektif dan efisien. Item-item pertanyaan dari faktor hubungan eksekutif dan legislatif terdiri dari (1) komunikasi eksekutif dan legislatif tidak efektif, (2) kesenjangan informasi antara eksekutif dan legislatif, (3) koordinasi antareksekutif dan legislatif belum baik, dan (4) eksekutif dan legislatif belum mampu bekerja sama (Ariesta dan Ritonga, 2010).

**H<sub>1</sub>: Hubungan pihak eksekutif dengan legislatif berpengaruh negatif terhadap kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD**

### **2.2.2 Latar Belakang Pendidikan terhadap Kurangnya ketepatan waktu Penyusunan APBD**

Coryanata (2007) menyatakan bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan sebagainya. Pengetahuan yang akan dibutuhkan dalam melakukan penyusunan APBD salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Apabila pengetahuan dewan tentang anggaran baik maka diharapkan anggota dewan dapat menyusun tepat waktu. Pengalaman dan pengetahuan dewan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat.

Latar belakang pendidikan sebagai wujud kompetensi apabila tidak memiliki kesesuaian dengan kegiatan penganggaran dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya ketepatan waktu dalam penyusunan APBD. Hal itu berkaitan dengan penempatan pihak yang kurang berkompeten dalam penyusunan APBD sehingga proses penyusunan APBD akan dapat terhambat (Ariesta dan Ritonga, 2010).

**H<sub>2</sub>: Latar belakang pendidikan berpengaruh negatif terhadap kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD**

### **2.2.3 Indikator Kinerja terhadap Kurangnya ketepatan waktu Penyusunan APBD**

Salah satu instrumen penting dalam APBD adalah indikator kinerja. Indikator kinerja memiliki peran penting karena indikator ini berguna dalam penentuan kinerja yang dicapai dari pelaksanaan APBD dan perlu diingat pula bahwa APBD disusun dengan berbasiskan pada kinerja. Beberapa faktor yang

harus diperhatikan dalam menentukan indikator kinerja yang tepat adalah standar pelayanan minimum, ketersediaan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan, kelanjutan program, tingkat inflasi, tingkat efisiensi, kendala di masa akan datang, dan dasar untuk menetapkan prioritas anggaran (Werimon *et al* (2007).

BPKP (2005) dalam Indrijawati (2008) menyatakan bahwa indikator kinerja harus memenuhi kriteria yang terdiri dari spesifik, dapat diukur, relevan, dan tidak bias. Penentuan indikator kinerja dalam penyusunan APBD bukanlah hal yang mudah. Tahapan penentuan indikator kinerja merupakan proses kompleks dan harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Tanpa adanya fasilitas dan sarana yang memadai maka penentuan indikator kinerja dapat menjadi sulit dan membutuhkan waktu yang lama yang berpengaruh pada ketepatan waktu APBD untuk ditetapkan.

**H<sub>3</sub>: Indikator kinerja berpengaruh negatif terhadap kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD**

#### **2.2.4 Komitmen Organisasi terhadap Kurangnya ketepatan waktu Penyusunan APBD**

Pada konteks ini karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi, akan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk melakukan pengawasan terhadap penyusunan keuangan daerah (APBD) menjadi relatif lebih tepat dan baik (Suhartono, 2006 dalam Pramita dan Andriyani, 2010).

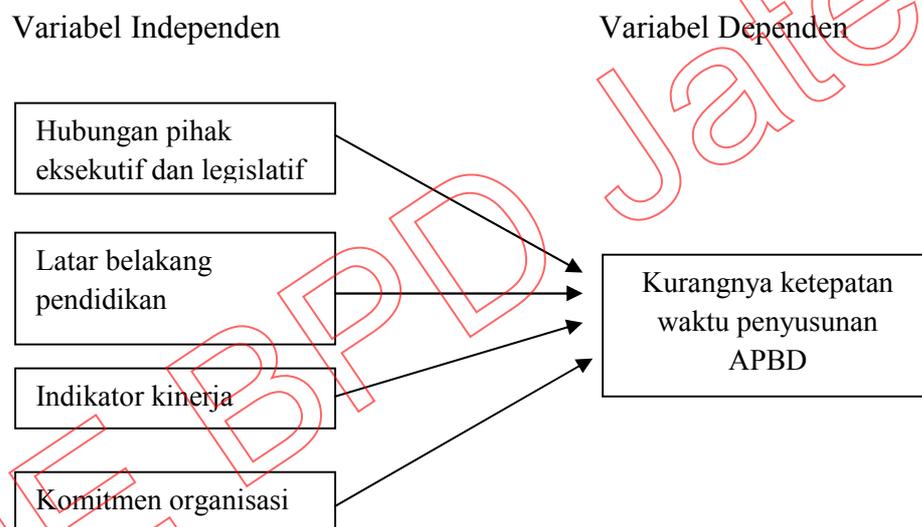
Mereka akan merasa terikat secara emosional dengan badan legislatif, badan legislatif sangat berarti bagi para penyusun APBD. Mereka merasa masalah yang ada di legislatif sama seperti masalah sendiri, semua anggota mau berusaha bekerja di atas batas normal untuk mensukseskan kinerja badan legislatif. Para anggota tetap bertahan dalam legislatif karena komitmen dan loyalitasnya, semua bersikap profesional terhadap kinerja yang dilakukannya (Utomo, 2011).

**H<sub>4</sub>: Komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD**

### 2.3 Model Penelitian

Berdasarkan uraian hubungan antar variabel dan hipotesisi yang diajukan, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas maka peneliti akan menyajikan model penelitian untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun variabel independen yang digunakan adalah pihak eksekutif dan legislatif, latar belakang pendidikan, indikator kinerja, dan komitmen organisasi. Model penelitian disajikan dalam gambar 2.1 berikut:

**Gambar 2.1**  
**Model Penelitian**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Definisi Konsep**

Definisi konsep merupakan definisi yang penting bagi suatu peneliti karena definisi ini digunakan untuk memberikan suatu gambaran mengenai topik penelitian yang akan diteliti. Definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

##### **3.1.1 Pengertian Kurangnya ketepatan waktu APBD**

Definisi kurangnya ketepatan waktu APBD adalah penyerahan RAPBD yang melebihi batas waktu yang ditentukan yaitu minggu pertama bulan Oktober (pasal 104 ayat 11 permendagri 59/2007). Menurut Abdullah (2011), secara normatif APBD sudah harus ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah (Perda) paling lambat pada 31 Desember. Namun, sebaiknya sudah di-perda-kan per 30 November, sehingga ada waktu selama sebulan (bulan Desember) untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan APBD pada tahun berkenaan. Misalnya, untuk mempersiapkan anggaran kas dan DPA-SKPD, serta SPD (Surat Penyediaan Dana), sehingga per 2 Januari sudah bisa dilakukan pencairan untuk uang persediaan (UP).

##### **3.1.2 Hubungan Pihak Eksekutif dan Legislatif**

Eksekutif adalah salah satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggungjawab untuk menerapkan hukum. Figur paling senior dalam sebuah cabang eksekutif disebut kepala pemerintahan. Eksekutif dapat merujuk kepada administrasi, dalam sistem presidensiil, atau sebagai pemerintah, dalam sistem parlementer.

Legislatif adalah badan yang anggotanya dianggap sebagai perwakilan dari rakyat yang bertugas untuk membuat hukum atau peraturan. Definisi legislatif/parlemen itu sendiri yang diartikan sebagai suatu tempat dimana secara

formal masalah-masalah kemasyarakatan dibahas oleh anggota masyarakat (Rahman, 2007).

Hubungan eksekutif dan legislatif merupakan komunikasi yang terjalin antara pihak eksekutif dan legislatif yang bisa memberikan pengaruh terhadap penyusunan APBD (artikel-media.blogspot.com/2009). Semakin baik hubungan kedua belah pihak semakin kecil kesalahan yang terjadi dalam penyusunan APBD, begitu juga sebaliknya.

### **3.1.3 Latar Belakang Pendidikan**

John Dewey berpendapat bahwa pendidikan adalah proses tanpa akhir. Pendidikan merupakan proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir (daya intelektual) maupun daya emosional (perasaan) yang diarahkan kepada tabiat manusia dan kepada sesamanya.

Van Cleve Morris berpendapat bahwa pendidikan adalah studi filosofis yang pada dasarnya bukan hanya alat untuk mengalihkan cara hidup secara menyeluruh kepada setiap generasi. Juga merupakan agent (lembaga) yang berugas melayani hati nurani masyarakat dalam perjuangannya mencapai hari yang lebih baik.

### **3.1.4 Indikator Kinerja**

Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasi atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan (Green, 1992 dalam Drs. H. Dadang Solihin, MA-Bappenas, 2008). Kinerja adalah hasil kerja kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada karyawan (Mangkunegara, 2007).

Pengertian Ringkas Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan kegunaan dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun setelahnya dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran (Mangkunegara, 2007). Sedangkan penentuan indikator kinerja dalam penyusunan APBD bukanlah hal yang mudah.

Tahapan penentuan indikator kinerja merupakan proses kompleks dan harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Tanpa adanya fasilitas dan sarana yang memadai maka penentuan indikator kinerja dapat menjadi sulit dan membutuhkan waktu yang lama yang berpengaruh pada ketepatan waktu APBD untuk ditetapkan (Ariesta dan Ritonga, 2010).

### 3.1.5 Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi adalah sebagai suatu keadaan dimana seseorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Komitmen organisasi juga dapat merupakan alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian kinerja yang diharapkan (Suhartono, 2006 dalam Pramita dan Andriyani, 2010).

### 3.2 Definisi Operasional

Kountur (2007) mengatakan bahwa definisi operasional adalah suatu definisi yang memberikan penjelasan atas suatu variabel dalam bentuk yang dapat diukur. Definisi operasional ini memberikan informasi yang diperlukan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Dengan kata lain, definisi operasional adalah definisi yang dibuat oleh peneliti itu sendiri.

Suyanto dan Salamah (2009) mengatakan bahwa definisi operasional yaitu konsep atau teori yang dapat diukur (*measureable*) atau diamati (*observable*).

Nazir (2009) mengatakan bahwa definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu konstruk dengan menggunakan konstruk yang lain.

Adapun definisi operasional masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Definisi Operasional masing-masing Variabel**

Variabel	Indikator
Kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD (Ariesta dan Ritonga, 2010)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurang atau terlambatnya informasi dari pusat</li> <li>- Perencanaan pembangunan</li> <li>- Jangka waktu penyusunan</li> </ul>

Hubungan pihak eksekutif dan legislatif (Ariesta dan Ritonga, 2010)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komunikasi eksekutif &amp; legislatif tidak efektif</li> <li>- Kesenjangan informasi antara eksekutif &amp; legislatif</li> <li>- Koordinasi antara eksekutif &amp; legislatif belum baik</li> <li>- Eksekutif &amp; legislatif belum mampu bekerja sama</li> </ul>
Latar belakang pendidikan (Ariesta dan Ritonga, 2010)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SKPD minim dengan latar belakang pendidikan terkait penganggaran</li> <li>- Banggar minim dengan latar belakang pendidikan terkait penganggaran daerah</li> <li>- TAPD minim dengan latar belakang pendidikan terkait penganggaran daerah</li> </ul>
Indikator kinerja (Ariesta dan Ritonga, 2010)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesulitan menerjemahkan indikator kinerja dalam APBD</li> <li>- Kurangnya informasi pemda dalam menentukan indikator kinerja pada APBD</li> <li>- Komunikasi antar anggota SKPD dalam menyusun APBD tidak efektif</li> </ul>
Komitmen organisasi (Ariesta dan Ritonga, 2010)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada kemauan kuat untuk menerapkan anggaran partisipatif</li> <li>- SKPD belum memahami visi, misi, sasaran, &amp; tujuan dari penyusunan APBD</li> <li>- Pihak eksekutif lebih mengutamakan kepentingan eksekutif dalam penyusunan APBD</li> </ul>

Variabel-variabel diatas diukur menggunakan skala likert, dimana jawaban diberi skor dengan menggunakan 5 (lima) point skala likert (Sekaran, 2000).

### 3.3 Populasi dan Responden

Populasi adalah kumpulan atau keseluruhan anggota dari objek penelitian dan memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan dalam penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pejabat pengelolaan anggaran daerah kabupaten Wonosobo.

Responden adalah orang yang dimintai jawaban/tanggapan atas pertanyaan yang diajukan. Kalau peneliti menyebarkan angket, maka responden adalah mereka yang mengisi peneliti. Kalau peneliti melakukan wawancara, maka

responden adalah orang yang peneliti wawancara. Dalam penelitian ini responden diminta untuk mengisi angket yang disebar. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan responden adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD. Responden dalam penelitian ini adalah Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang terdiri dari inspektorat, bappeda, setda dan DPPKAD di Kabupaten Wonosobo tahun 2009, 2010, 2011.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan pihak yang terkait. Untuk mengumpulkan data dilakukan dengan menggunakan metode kuisiner, artinya peneliti menyusun daftar pertanyaan secara tertulis yang kemudian dibagikan kepada responden guna memperoleh data yang berhubungan dengan kegiatan penelitian. (Umar, 1999 : 43). Daftar pertanyaan yang dibuat berhubungan dengan variabel yang diteliti yaitu kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD, hubungan pihak eksekutif dan legislatif, latar belakang pendidikan, indikator kinerja, dan komitmen organisasi. Peneliti menunggu hasil jawaban atas kuisiner yang diberikan kepada responden sampai selesai, dan memberikan penjelasan kepada responden apabila dibutuhkan.

### **3.5 Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dengan menggunakan metode kuantitatif, diharapkan akan didapatkan hasil pengukuran yang lebih akurat tentang respon yang diberikan responden, sehingga data yang berbentuk angka tersebut dapat diolah dengan menggunakan metode statistik. Pada penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu SPSS untuk menguji coba butir pertanyaan tersebut adalah valid.

#### **3.5.1 Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisiner (Ghozali, 2006:49). Suatu kuisiner dikatakan valid jika pertanyaan

pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi, validitas adalah mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah dibuat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak diukur. Uji validitas dapat diketahui dengan melihat  $r$  hitung. Apabila  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel = valid dan  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel = tidak valid (Ghozali, 2006:50).

### 3.5.2 Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006:45). Jawaban responden terhadap pertanyaan ini dikatakan reliabel jika masing-masing pertanyaan dijawab secara konsisten atau jawaban tidak boleh acak oleh karena masing-masing pertanyaan hendak mengukur hal yang sama. Jika jawaban terhadap indikator ini acak, maka dapat dikatakan bahwa tidak reliabel (Ghozali, 2006:46).

Pengukuran realibilitas dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

1. *Repeated Measure* atau pengukuran ulang. Di sini seseorang akan disodori pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda, dan kemudian dilihat apakah orang tersebut tetap konsisten dengan jawabannya.
2. *One Shot* atau pengukuran sekali saja. Disini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Alat untuk mengukur reliabilitas adalah *Cronbach Alpha*.

*Cronbach Alpha*

### 3.5.3 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan sampel atau deskripsi suatu data yang telah dikumpulkan dalam kondisi sebenarnya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku umum dan generalisasi (Ghozali, 2006:19). Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden yang dilihat dari nilai rata-rata dan

standar deviasi yang diungkapkan untuk memperjelas deskripsi (Ghozali, 2006:19).

Peneliti memperoleh gambaran demografi responden berupa: *gender*, umur, golongan, nama instansi, pendidikan, dan pelatihan dan pendidikan penganggaran keuangan daerah. Identitas responden ini sekiranya dapat memberikan gambaran mengenai variabel-variabel penelitian (kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD, hubungan pihak eksekutif dan legislatif, latar belakang pendidikan, indikator kinerja, dan komitmen organisasi).

### 3.5.4 Analisis Regresi

Analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini untuk menganalisa kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD sebagai variabel dependen (Y), dengan hubungan pihak eksekutif dan legislatif ( $X_1$ ), latar belakang pendidikan ( $X_2$ ), indikator kinerja ( $X_3$ ), dan komitmen organisasi ( $X_4$ ) sebagai variabel independen. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana:

a = konstanta

b = koefisien regresi

Y = kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD

$X_1$  = pihak eksekutif dan legislatif

$X_2$  = latar belakang pendidikan

$X_3$  = indikator kinerja

$X_4$  = komitmen organisasi

e = error

### 3.5.5 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian terhadap model penelitian, terlebih dahulu dilakukan pengujian model tersebut apakah memenuhi asumsi klasik regresi, yang terdiri dari (Ghozali, 2006:93):

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang akan digunakan dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk menguji suatu data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan menggunkan grafik, yaitu grafik normal plot (Ghozali, 2006:147). Pada grafik normal plot, dengan asumsi :

- 1) apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas;
- 2) apabila data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi uji asumsi normalitas.

Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

$H_0$  : Data residual berdistribusi normal

$H_A$  : Data residual tidak berdistribusi normal

#### b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006:125).

Deteksi ada tidaknya problem heteroskedastisitas adalah dengan media grafik, apabila grafik membentuk pola khusus maka model terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2006:125).

Dasar pengambilan keputusan :

- a) jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi Heteroskedastisitas;
- b) jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.

c. Uji Glejser

Pengujian heteroskedastisitas dengan metode grafik lazim dipergunakan meskipun menimbulkan bias, karena pengamatan antara satu pengamat dengan pengamat lain bisa menimbulkan perbedaan persepsi. Oleh karena itu, penggunaan uji statistik diharapkan menghilangkan unsur bias tersebut. Salah satu uji statistik yang lazim dipergunakan adalah uji Glejser.

Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan variabel-variabel bebas terhadap nilai absolut residualnya (Gujarati, 2004). Sebagai pengertian dasar, residual adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi; dan absolut adalah nilai mutlaknya.

d. Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (independen). Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas (independen) yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas (independen) sama dengan nol (0). Untuk mendeteksi ada

atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut (Ghozali, 2006:105-95) :

- a). mempunyai angka Tolerance diatas ( $>$ ) 0,1
- b). mempunyai nilai VIF di di bawah ( $<$ ) 10

### 3.5.6 Uji Kebaikan Model

- a. Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square = Adjusted  $R^2$* )

Koefisien determinasi (*Adjusted  $R^2$* ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dengan variabel independen (hubungan pihak eksekutif dan legislatif, latar belakang pendidikan, indikator kinerja, dan komitmen organisasi) dalam menerangkan variasi variabel dependen (kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol ( $0$ ) dan satu ( $1$ ). Nilai *Adjusted  $R^2$*  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2006:87).

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimaksudkan kedalam model. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted  $R^2$*  (*Adjusted R Square*) pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik (Ghozali, 2006).

- b. Uji Signifikansi Simultan (Uji – F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2006:88).

Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikansi

1. diterima, artinya variabel-variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Apabila nilai signifikansinya  $> 0,05$  maka hipotesis alternatif tidak dapat diterima, artinya variabel-variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

### 3.5.7 Pengujian Hipotesis (Uji t)

Pengujian Hipotesis dilakukan dengan Uji Signifikansi Parameter Individual ( Uji Statistik t). Untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, maka digunakan pengujian yaitu uji – t.

Hasil pengujian tersebut akan menentukan apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Pengujian hipotesis menggunakan uji t bertujuan untuk membuktikan apakah variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikatnya. Uji t juga digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006:88).

Perumusan hipotesis :

1.  $H_{01} \quad \beta_1 = 0$ , artinya hubungan pihak eksekutif dan legislatif tidak berpengaruh negatif terhadap kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD.

$H_{a1} \quad \beta_1$   
negatif terhadap kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD.

2.  $H_{02} \quad \beta_2 = 0$ , artinya latar belakang pendidikan tidak berpengaruh negatif terhadap kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD.

$H_{a2} \quad \beta_2$   
kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD.

3.  $H_{03} \quad \beta_3 = 0$ , artinya indikator kinerja tidak berpengaruh negatif terhadap kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD.

$H_{a3} \quad \beta_3 < 0$   
ketepatan waktu penyusunan APBD.

4.  $H_{04} \quad \beta_4 = 0$ , artinya komitmen organisasi tidak berpengaruh negatif terhadap kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD.

$H_{a4} \quad \beta_4 < 0$   
kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD.

0,05), dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

1.  $t_{hitung} > t_{tabel}$  artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. apabila nilai signifikansinya  $> 0,05$  maka hipotesis alternatif tidak dapat diterima, artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM OBJEK DAN HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum

##### 4.1.1. Kabupaten Wonosobo

Kabupaten Wonosobo adalah sebuah kabupaten di Propinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah Wonosobo. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang di timur, Kabupaten Purworejo di selatan, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara di barat, serta Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal di utara. Sebagian besar wilayah Kabupaten Wonosobo adalah daerah pegunungan. Bagian timur (perbatasan dengan Kabupaten Temanggung) terdapat dua gunung berapi: Gunung Sindoro (3.136 meter) dan Gunung Sumbing (3.371 meter). Daerah utara merupakan bagian dari Dataran Tinggi Dieng, dengan puncaknya Gunung Prahu (2.565 meter). Di sebelah selatan, terdapat Waduk Wadaslintang.

Ibukota Kabupaten Wonosobo berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten, yang merupakan daerah hulu Kali Serayu. Wonosobo dilintasi jalan propinsi yang menghubungkan Semarang-Purwokerto. Kabupaten Wonosobo terdiri atas 15 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Wonosobo.

##### 4.1.2. Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang terdiri dari inspektorat, bappeda, setda dan DPPKAD di Kabupaten Wonosobo tahun 2009, 2010, 2011. Jumlah responden dalam penelitian mengenai hubungan pihak eksekutif & legislatif, latar belakang pendidikan, indikator kinerja, dan komitmen organisasi terhadap kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD dapat dilihat dari tabel distribusi responden berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Tabel Distribusi Responden**

Organisasi	Kuesioner	
	Di distribusikan	Diperoleh kembali
Badan Anggaran DPRD	10	8
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)		
terdiri dari:		
1. Inspektorat	10	6
2. Bappeda	10	10
3. Setda	10	7
4. DPPKAD	10	9
Jumlah	50	40
Kuesioner yang rusak/tidak dapat diolah		0
Kuesioner yang dapat diolah		40

Sumber: Data primer yang diolah

Pada tabel distribusi responden memperlihatkan, total kuesioner yang disebar sebanyak 50 kuesioner, setelah kurang lebih satu minggu peneliti mengambil kuesioner tersebut, jika ada responden yang belum menyelesaikan pengisian, peneliti memberi perpanjangan waktu satu minggu lagi. Total kuesioner yang kembali sebanyak 40 dan tidak terdapat kuesioner yang rusak sehingga semua kuesioner tersebut dapat diolah.

Tabel berikut ini merupakan hasil deskripsi terhadap para responden yang telah melakukan pengisian kuesioner. Deskripsi dilakukan berdasarkan jenis kelamin, umur, golongan, nama instansi, pendidikan, dan pelatihan dan pendidikan penganggaran keuangan daerah:

**Tabel 4.2**  
**Tabel Deskripsi Responden**

Keterangan Kategori		Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Pria	22	55
	Wanita	18	45
Umur	15-20 tahun		
	21-25 tahun	5	12,5
	26-30 tahun	11	27,5
	31-35 tahun	19	47,5
	> 35 tahun	5	12,5
*Golongan	I		
	II		
	III	22	68,75
	IV	10	31,25
Nama Instansi	DPRD	8	20
	Inspektorat	6	15
	Bappeda	7	17,5
	Setda	10	25
	DPPKAD	9	22,5
Pendidikan	SMA	6	15
	D1/D2/D3	15	37,5
	S1	19	47,5
	S2		
	S3		
	Lainnya		
Pelatihan & Pendidikan Penganggaran Keuangan Daerah	Ya	15	37,5
	Tidak	25	62,5
Total		40	100

\*Dalam DPRD tidak terdapat golongan

Sumber: Data primer yang diolah

Berikut ini analisa dari hasil deskripsi responden:

1. Berdasarkan jenis kelaminnya memperlihatkan bahwa jumlah responden pria sebanyak 55% dan sedikit lebih banyak dibanding responden wanita yaitu 45%. Ini berarti bahwa tidak ada perbedaan jenis kelamin dalam merekrut anggota untuk melakukan penyusunan APBD di Kabupaten Wonosobo.
2. Berdasarkan umur memperlihatkan kebanyakan responden termasuk dalam kategori 31-35 tahun (47,5%). Dilihat dari umur menunjukkan bahwa seharusnya responden sudah berpengalaman dalam bekerja.
3. Berdasarkan golongan memperlihatkan kebanyakan pegawai yang ikut serta dalam penyusunan APBD masuk dalam golongan III yaitu 68,75%. Penggolongan ini berdasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang dimiliki.
4. Berdasarkan dari instansi yang terlibat dalam penyusunan APBD terlihat bahwa masing-masing dari instansi mempunyai peran yang hampir sama besar dalam pelaksanaan penyusunan APBD.
5. Berdasarkan pendidikan memperlihatkan kebanyakan responden di Kabupaten Wonosobo mempunyai tingkat akhir pendidikan strata 1 (S1).
6. Berdasarkan pelatihan dan pendidikan penganggaran keuangan daerah sebagian besar yang terlibat dalam penyusunan APBD tidak mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang cukup mengenai penganggaran keuangan daerah yang digunakan modal dalam penyusunan APBD.

## **4.2 Hasil Analisis Data**

### **4.2.1. Uji Validitas**

Hasil uji validitas yang digunakan untuk melihat sah atau valid tidaknya suatu kuesioner untuk dijadikan sebagai alat ukur variabel, dalam penelitian ini untuk menentukan valid tidaknya indikator dilakukan dengan melakukan

= 0,05 dan n

(responden) = 40 didapat r tabel sebesar 0,312. Ini diperoleh dengan cara jumlah 0,05 didapat r tabel = 0,312. Ketentuan untuk melihat validitas suatu indikator yaitu apabila :  $R_{hitung} > R_{tabel} = \text{Valid}$  dan  $R_{hitung} < R_{tabel} = \text{Tidak Valid}$ .

Hasil Uji Validitas pada variabel hubungan pihak eksekutif dan legislatif adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Validitas Hubungan Pihak Eksekutif & Legislatif**

Variabel	Indikator	R <sub>hitung</sub> (corrected item correlation)	R <sub>tabel</sub>	Keterangan
Hubungan pihak eksekutif & legislatif	Indikator 1	0,499	0,312	Valid
	Indikator 2	0,409	0,312	Valid
	Indikator 3	0,625	0,312	Valid
	Indikator 4	0,594	0,312	Valid
	Indikator 5	0,454	0,312	Valid
	Indikator 6	0,445	0,312	Valid
	Indikator 7	0,361	0,312	Valid

Sumber: Data primer yang diolah

Hasil dari perbandingan antara nilai r<sub>hitung</sub> dengan r<sub>tabel</sub> memperlihatkan semua angka dari setiap indikator berada di atas nilai r<sub>tabel</sub>. Dengan demikian dapat disimpulkan semua indikator yang digunakan valid untuk digunakan sebagai alat ukur hubungan pihak eksekutif dan legislatif.

Hasil uji validitas pada variabel latar belakang pendidikan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Validitas Latar Belakang Pendidikan**

Variabel	Indikator	R <sub>hitung</sub> (corrected item correlation)	R <sub>tabel</sub>	Keterangan
Latar belakang pendidikan	Indikator 1	0,533	0,312	Valid
	Indikator 2	0,396	0,312	Valid
	Indikator 3	0,360	0,312	Valid
	Indikator 4	0,519	0,312	Valid
	Indikator 5	0,471	0,312	Valid
	Indikator 6	0,391	0,312	Valid
	Indikator 7	0,613	0,312	Valid
	Indikator 8	0,484	0,312	Valid
	Indikator 9	0,705	0,312	Valid

Sumber: Data primer yang diolah

Hasil dari perbandingan antara nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel memperlihatkan semua angka dari setiap indikator berada di atas nilai  $r$  tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan semua indikator yang digunakan valid untuk digunakan sebagai alat ukur latar belakang pendidikan.

Hasil uji validitas pada variabel indikator kinerja adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Validitas Indikator Kinerja**

Variabel	Indikator	R hitung (corrected item correlation)	R tabel	Keterangan
Indikator kinerja	Indikator 1	0,633	0,312	Valid
	Indikator 2	0,503	0,312	Valid
	Indikator 3	0,486	0,312	Valid
	Indikator 4	0,664	0,312	Valid
	Indikator 5	0,452	0,312	Valid
	Indikator 6	0,547	0,312	Valid

Sumber: Data primer yang diolah

Hasil dari perbandingan antara nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel memperlihatkan semua angka dari setiap indikator berada di atas nilai  $r$  tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan semua indikator yang digunakan valid untuk digunakan sebagai alat ukur indikator kinerja.

Hasil uji validitas pada variabel komitmen organisasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Validitas Komitmen Organisasi**

Variabel	Indikator	R hitung (corrected item correlation)	R tabel	Keterangan
Komitmen Organisasi	Indikator 1	0,544	0,312	Valid
	Indikator 2	0,386	0,312	Valid
	Indikator 3	0,501	0,312	Valid
	Indikator 4	0,431	0,312	Valid
	Indikator 5	0,376	0,312	Valid
	Indikator 6	0,538	0,312	Valid

Sumber: Data primer yang diolah

Hasil dari perbandingan antara nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel memperlihatkan semua angka dari setiap indikator berada di atas nilai  $r$  tabel.

Dengan demikian dapat disimpulkan semua indikator yang digunakan valid untuk digunakan sebagai alat ukur komitmen organisasi.

Hasil uji validitas pada variabel kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Validitas Kurangnya Ketepatan Waktu Penyusunan APBD**

Variabel	Indikator	R hitung (corrected item correlation)	R tabel	Keterangan
Kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD	Indikator 1	0,408	0,312	Valid
	Indikator 2	0,612	0,312	Valid
	Indikator 3	0,577	0,312	Valid

Sumber: Data primer yang diolah

Hasil dari perbandingan antara nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel memperlihatkan semua angka dari setiap indikator berada di atas nilai  $r$  tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan semua indikator yang digunakan valid untuk digunakan sebagai alat kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD.

#### 4.2.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas yang digunakan untuk melihat kehandalan suatu indikator yang digunakan sebagai alat ukur variabel, dimana ketentuan untuk melihat reliabilitas adalah apabila *cronbach's alpha*  $< 0,60$  tidak reliabel. Berikut ini hasil uji reliabilitas:

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Hasil Cronbach alpha	Keterangan
Hubungan pihak eksekutif & legislatif ( $X_1$ )	0,765 > 0,60	Reliabel
Latar belakang pendidikan ( $X_2$ )	0,801 > 0,60	
Indikator kinerja ( $X_3$ )	0,793 > 0,60	
Komitmen organisasi ( $X_4$ )	0,728 > 0,60	
Kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD	0,709 > 0,60	

Sumber: Data primer yang diolah

Hasil uji reliabilitas memperlihatkan nilai *cronbach alpha's* semua variabel diatas 0,06 artinya dari data yang didapat mampu menunjukkan indikator yang digunakan oleh variabel hubungan pihak eksekutif dan legislatif, latar

belakang pendidikan, indikator kinerja, komitmen organisasi, dan kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD terbukti reliabel atau handal untuk digunakan sebagai alat ukur variabel.

#### 4.2.3. Analisis Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi dari suatu data yang dilihat dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Berikut ini dijelaskan statistik data penelitian:

**Tabel 4.9**  
**Statistik Deskriptif**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X <sub>1</sub>	40	13,00	32,00	24,5750	5,22267
X <sub>2</sub>	40	16,00	44,00	33,4250	6,46048
X <sub>3</sub>	40	11,00	29,00	20,6500	5,11183
X <sub>4</sub>	40	10,00	28,00	20,3500	4,55479
Y	40	9,00	15,00	13,5000	1,35873

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel statistik deskriptif di atas menunjukkan jumlah responden adalah sebanyak 40. Dapat dilihat jika nilai minimum dari variabel kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD adalah 9,00 sedangkan nilai maksimum yang diperoleh sebesar 15,00 dengan nilai rata-ratanya 13,5000 dan standar devisiasinya dari variabel tersebut adalah 1,35873. Hasil nilai minimum untuk variabel hubungan pihak eksekutif dan legislatif sebesar 13,00 dan maksimum 32,00 dengan rata-rata 24,5750 dan standar devisiasinya 5,22267. Variabel latar belakang pendidikan memiliki nilai minimum 16,00 dan maksimum 44,00 dengan rata-rata 33,4250 dan standar devisiasi 6,46048. Variabel indikator

kinerja memiliki nilai minimum 11,00 dan maksimum 29,00 dengan rata-rata 20,6500 dan standar deviasi 5,11183. Untuk komitmen organisasi nilai minimumnya yaitu sebesar 10,00. Nilai maksimumnya adalah 28,00 dengan nilai rata-rata 20,3500 dan memiliki standar deviasi 4,55479.

Hasil uji statistik deskriptif, memperlihatkan nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata dari masing-masing variabel. Ini berarti penyimpangan yang terjadi rendah sehingga penyebaran data normal.

#### 4.2.4. Analisis Regresi Linier

Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini untuk menganalisis masing-masing variabel yaitu kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD sebagai variabel dependen (Y), hubungan pihak eksekutif dan legislatif (X<sub>1</sub>), latar belakang pendidikan (X<sub>2</sub>), indikator kinerja (X<sub>3</sub>), dan komitmen organisasi (X<sub>4</sub>) sebagai variabel independen.

**Tabel 4.10**  
**Analisis Regresi**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	34,801	2,491		13,968	,000
X1	-,125	,059	-,221	-2,129	,040
X2	-,216	,058	-,386	-3,688	,001
X3	-,178	,060	-,307	-2,948	,006
X4	-,302	,083	-,383	-3,632	,001

Persamaan untuk hasil regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 34,801 - 0,125(X_1) - 0,216(X_2) - 0,178(X_3) - 0,302(X_4) + e$$

Persamaan regresi tersebut mempunyai arti:

Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa hubungan pihak eksekutif dan legislatif ( $X_1$ ), latar belakang pendidikan ( $X_2$ ), indikator kinerja ( $X_3$ ), dan komitmen organisasi ( $X_4$ ) memberikan pengaruh terhadap kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD sebagai variabel dependen ( $Y$ ).

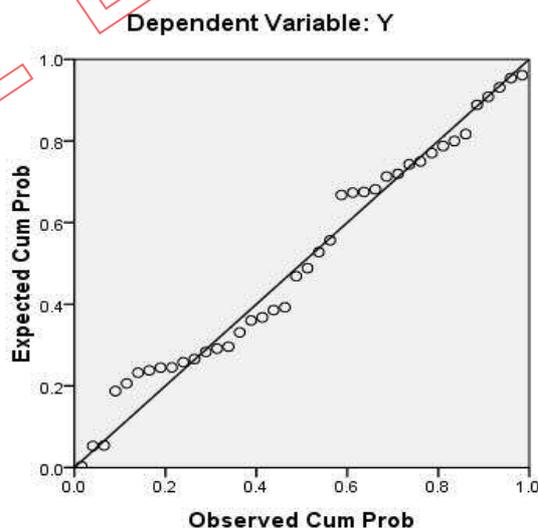
#### 4.2.5. Uji Asumsi Klasik

Dalam pengujian yang menggunakan teknik analisis regresi berganda, maka data-data yang digunakan harus memenuhi beberapa uji asumsi, uji tersebut terdiri dari :

a. Uji Normalitas

Normalitas suatu data dapat dilihat dengan pengujian diantaranya menggunakan grafik, yaitu *normal probability plot*. Selain itu uji normalitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik non parametrik kolmogorov-smirnov (K-S) (Ghozali, 2006:152). Hasil normalitas adalah sebagai berikut:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



**Gambar 4.1**  
**Grafik Normal p-p Plot**  
Sumber: Data primer yang diolah

Pada grafik *normal probability plot* memperlihatkan titik-titik menyebar dan mengikuti garis diagonalnya, dengan demikian berdasarkan kurva normal p-plot, data yang digunakan berdistribusi normal dan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,77163567
Most Extreme Differences	Absolute	,101
	Positive	,088
	Negative	-,101
Kolmogorov-Smirnov Z		,641
Asymp. Sig. (2-tailed)		,805

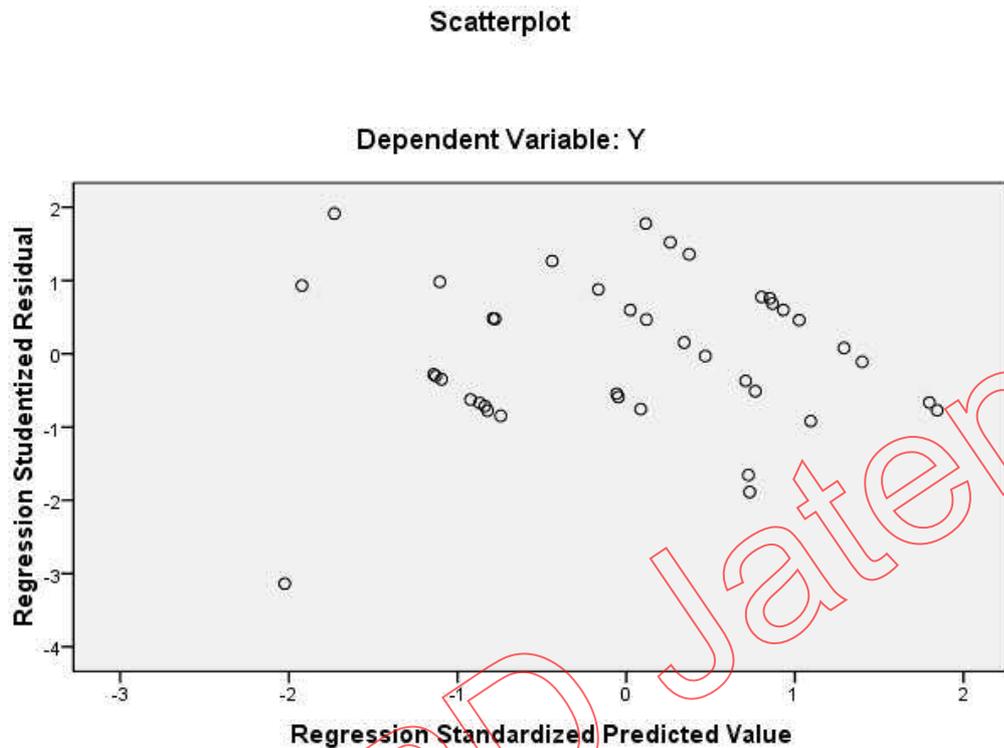
a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.11 tersebut, dapat disimpulkan bahwa besarnya nilai *Kolmogorov Smirnov* adalah 0,641 dan signifikan pada 0,805. Hal ini berarti data residual berdistribusi normal karena signifikansi  $> 0,05$  sehingga model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dimaksudkan untuk menguji apakah variasi data yang digunakan bersifat sejenis atau tidak heterogen (heteroskedastisitas). Dalam penelitian ini deteksi ada tidaknya problem heteroskedastisitas adalah dengan media grafik scatterplot, apabila grafik tidak membentuk pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2006:125). Hasil pengujian tersebut adalah:



**Gambar 4.2**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**  
**(Grafik Scatter Plot)**

Sumber : Data primer yang diolah

c. Uji Glejser

Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan variabel-variabel bebas terhadap nilai absolut residualnya (Gujarati, 2004). Sebagai pengertian dasar, residual adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi; dan absolut adalah nilai mutlaknya (Ghozali, 2006:129).

Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Glejser**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1,806	1,362		-1,326	,193
X1	,035	,032	,188	1,094	,281
X2	,040	,032	,220	1,267	,214
X3	,015	,033	,080	,465	,645
X4	-,011	,045	-,044	-,252	,803

Dari output di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi keempat variabel independen lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

d. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi diantara variabel independen. Pada pengujian model regresi tidak diperbolehkan adanya multikolinearitas atau antara variabel independen tidak saling berkorelasi. Tidak terjadinya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance value* berada di atas 0,1 dan *variance inflation value* atau nilai VIF masing-masing variabel independen berada di bawah 10.

Hasil uji multikolinieritas yang didapat adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Hubungan pihak eksekutif & legislatif	0,856	1,168
Latar belakang pendidikan	0,840	1,190
Indikator kinerja	0,850	1,177
Komitmen organisasi	0,830	1,205

Hasil uji multikolinearitas memperlihatkan pada variabel independen ke semua nilai tolerance berada di atas 0,1 dan nilai VIF berada di bawah 10, maka diperoleh kesimpulan bahwa diantara variabel independen tidak saling berkorelasi atau tidak terjadi multikolinearitas.

#### 4.2.6. Uji Kebaikan Model

a. Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square = Adjusted R<sub>2</sub>*)

Hasil regresi juga mendapatkan hasil koefisien determinasi, koefisien determinasi ini digunakan untuk menunjukkan besarnya hubungan pihak eksekutif dan legislatif, latar belakang pendidikan, indikator kinerja dan komitmen organisasi terhadap kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD di Kabupaten Wonosobo. Hasil koefisien determinasi yang didapat adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.14**  
**Hasil Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,823 <sup>a</sup>	,677	,641	,81454

Sumber: Data primer yang diolah

Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada nilai *adjusted r square* yang menunjukkan angka sebesar 0,641, dengan demikian bisa diartikan besarnya hubungan eksekutif dan legislatif, latar belakang pendidikan, indikator kinerja dan komitmen organisasi terhadap kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD adalah 64,1%, sementara sisanya sebesar 35,9% (100%-64,1%) kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD pada Kabupaten Wonosobo ditentukan oleh faktor lain yang tidak diteliti.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil Uji F dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.15**  
**Hasil Uji F**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	48,779	4	12,195	18,380	,000 <sup>a</sup>
	Residual	23,221	35	,663		
	Total	72,000	39			

Sumber: Data primer yang diolah

Nilai Uji F sebesar 18,380 dengan signifikansi 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan hubungan pihak eksekutif dan legislatif, latar belakang pendidikan, indikator kinerja, dan komitmen organisasi terhadap kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD secara simultan diterima, karena nilai signifikansi yang didapat  $< 0,05$ .

#### 4.2.7. Uji Hipotesis (Uji Statistik t)

Uji t digunakan untuk membuktikan adanya pengaruh yang signifikan antara hubungan pihak eksekutif dan legislatif, latar belakang pendidikan, indikator kinerja, dan komitmen organisasi terhadap kurangnya ketepatan waktu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.16**  
**Hasil Uji F**

	Variabel	Nilai t	Sig.
1	(Constant)	13,968	,000
	X <sub>1</sub> (hubungan pihak eksekutif dan legislatif)	-2,129	,040
	X <sub>2</sub> (latar belakang pendidikan)	-3,688	,001
	X <sub>3</sub> (indikator kinerja)	-2,948	,006
	X <sub>4</sub> (komitmen organisasi)	-3,632	,001

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan hasil uji statistik t menunjukkan bahwa semua variabel menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas signifikansi untuk masing-masing variabel, hubungan pihak eksekutif dan legislatif sebesar 0,040 (  $p < 0,05$  ); latar belakang pendidikan dengan signifikan 0,001 (  $p < 0,05$  ); indikator kinerja dengan signifikan 0,006 (  $p < 0,05$  ) dan komitmen organisasi dengan signifikan 0,001 (  $p < 0,05$  ).

### 4.3 Analisis dan Pembahasan

Penelitian ini mengangkat judul hubungan pihak eksekutif dan legislatif, latar belakang pendidikan, indikator kinerja dan komitmen organisasi terhadap kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD di Kabupaten Wonosobo. Hasil penelitian ini mengungkap hal-hali berikut:

#### 4.3.1 Pengujian Hipotesis Pertama: Hubungan pihak eksekutif dengan legislatif berpengaruh negatif terhadap kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD.

Berdasarkan nilai uji t pada hubungan pihak eksekutif dan legislatif sebesar -2.129 dengan signifikan 0,040. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan hubungan pihak eksekutif dan legislatif mempunyai pengaruh negatif terhadap kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD, karena nilai  $p < 0,05$ . Jika terjadi hubungan yang baik antara pihak eksekutif dan legislatif tersebut maka akan memperkecil adanya asimetri informasi yang terjalin antara kedua belah pihak sehingga akan memperkecil pula tingkat kurangnya ketepatan waktu dalam penyusunan APBD. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuraeni (2009) yang menyatakan membaiknya hubungan pihak eksekutif dan legislatif akan mengurangi tingkat kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD.

#### **4.3.2 Pengujian Hipotesis Kedua : Latar belakang pendidikan berpengaruh negatif terhadap kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD.**

Berdasarkan nilai uji t pada latar belakang pendidikan sebesar -3.688 dengan signifikan 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh negatif terhadap kurangnya ketepatan waktu dalam penyusunan APBD dengan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  = 0,05. Ini berarti bahwa semakin banyak pengetahuan yang dimiliki oleh para anggota khususnya mengenai hal penyusunan APBD maka hal tersebut akan berpengaruh untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD di suatu kabupaten. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Bastian (2008) yang menyimpulkan latar belakang pendidikan yang baik akan berpengaruh negatif terhadap kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD.

#### **4.3.3 Pengujian Hipotesis Ketiga : Indikator kinerja berpengaruh negatif terhadap kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD.**

Berdasarkan nilai uji t pada indikator kinerja sebesar -2.948 dengan signifikan 0,006. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan indikator kinerja mempunyai pengaruh negatif terhadap kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD dengan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  = 0,05.

Dalam hal ini indikator kinerja seperti teknologi dan fasilitas yang disediakan terbukti mampu mendukung dalam proses penyusunan APBD, ini dikarenakan fasilitas yang semakin baik dan modern maka akan mempermudah anggota dalam menyusun APBD sehingga kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD dirasa tidak akan terjadi lagi. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan Nuraeni (2009).

#### **4.3.4 Pengujian Hipotesis Keempat : Komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD.**

Berdasarkan nilai uji t pada komitmen organisasi sebesar -3.632 dengan signifikan 0,001. Itu berarti hipotesis komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kurangnya ketepatan waktu dalam penyusunan APBD diterima, karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$ .

= 0,05. Komitmen organisasi yang tinggi akan menimbulkan motivasi yang tinggi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dan tanggungjawab yang dimiliki oleh pegawai sehingga akan memperkecil kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Utomo (2011).

STIE BPPD Jateng

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil regresi linier sebagaimana dijelaskan sebelumnya didapat bahwa model yang dikembangkan dalam penelitian ini menunjukkan hubungan antara variabel-variabel yang dihipotesiskan dalam penelitian ini:

- a. Hubungan pihak eksekutif dan legislatif terbukti berpengaruh negatif terhadap kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD.
- b. Latar belakang pendidikan terbukti berpengaruh negatif terhadap kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD.
- c. Indikator kinerja terbukti berpengaruh negatif terhadap kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD.
- d. Komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD.

#### **5.2.1 Keterbatasan**

Keterbatasan adalah hal-hal yang terjadi di luar dari apa yang telah direncanakan oleh peneliti yang menjadi halangan dalam melakukan penelitian.

Di dalam penelitian ini keterbatasan tersebut antara lain:

- a. Peneliti hanya menyebarkan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pernyataan lisan, sehingga kemungkinan jawaban responden belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
- b. Hasil penelitian ini hanya dapat dijadikan analisis pada obyek penelitian yang terbatas pada pemerintahan Kabupaten Wonosobo, sehingga memungkinkan adanya perbedaan hasil penelitian dan kesimpulan apabila penelitian dilakukan pada obyek penelitian yang berbeda.

### **5.3 Saran Penelitian**

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya yaitu:

- a. Melakukan wawancara langsung dengan responden, sehingga dapat diperoleh jawaban yang mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Persepsi responden yang hanya disampaikan lewat pernyataan kuesioner saja belum tentu mencerminkan keadaan yang sesungguhnya.
- b. Menggunakan sampel yang lebih luas, tidak hanya pada pemerintahan Kabupaten Wonosobo.

### **5.4 Implikasi**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintahan Kabupaten Wonosobo dalam melakukan perbaikan penyusunan rancangan anggaran pemerintah daerah. Memberikan gambaran yang jelas mengenai jangka waktu penyusunan APBD yang sesuai dengan peraturan, hal-hal apa saja dan kriteria seperti apa yang sekiranya dapat mempengaruhi penyusunan APBD sehingga diharapkan tidak terjadi lagi kurangnya ketepatan waktu penyusunan APBD pada tahun-tahun berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin (2009), Identifikasi dan Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sinkronisasi Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Studi Kasus Provinsi D.I Yogyakarta TA 2008), *Tesis S2*, Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta, tersedia di [syukriy.wordpress.com/2011/02/10/keterlambatan-APBD](http://syukriy.wordpress.com/2011/02/10/keterlambatan-APBD).
- Ariesta, Wangi Chitra dan Ritonga (2010), Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan Dalam Penyusunan APBD (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2008-2010), *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIII*, Purwokerto.
- [Artikel-media.blogspot.com/2009/12/penyusunan-APBD.html](http://Artikel-media.blogspot.com/2009/12/penyusunan-APBD.html)
- Bastian, Indra (2008), Keterlambatan APBD Dalam Analisis Siklus, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume 7, Nomor 2, September 2008, hlm. 115-130.
- Bastian, Indra, *Kurangnya ketepatan waktu APBD*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Buletin Statistik (2012), BPS Wonosobo edisi Maret 2012
- Coryanata, Isma (2007), Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD), *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X*, Makassar.
- Drs. H. Dadang Solihin (2008), MA-Bappepas.
- Ghozali, Imam (2006), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS/9*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- [Id.shvoong.com/social-sciences/economics/Kurangnya ketepatan waktu Penyusunan APBD](http://Id.shvoong.com/social-sciences/economics/Kurangnya_ketepatan_waktu_Penyusunan_APBBD).
- [Id.wikipedia.org/wiki/Pengertian dan Faktor yang Berpengaruh Pada Penyusunan APBD](http://Id.wikipedia.org/wiki/Pengertian_dan_Faktor_yang_Berpengaruh_Pada_Penyusunan_APBBD).
- Indrijawati, Aini (2008), Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah, *Jurnal Ichsan Gorontalo*, Vol. 3 No. 2 Makassar.
- Jogiyanto (2008), Pedoman Survei Kuesioner: Mengembangkan Kuesioner, Mengatasi Bias dan Meningkatkan Respon, BPFE-Yogyakarta.
- Mangkunegara (2007), Analisis Keterlambatan APBD, Universitas Sumatera Utara, Sumatera.
- Norsain (2010), Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan Dalam Penyusunan APBD (Studi Kasus Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2007-2010), *Tesis S2*, Program Pasca Sarjana Universitas

Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, tersedia di [eprints.upnjatim.ac.id](http://eprints.upnjatim.ac.id).

Nuraeni Utari (2009), Studi Fenomenologis Tentang Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Kabupaten Temanggung, *Tesis S2 Magister Akuntansi*, Universitas Diponegoro, Semarang, tersedia di [kumpulanskripsi.wordpress.com/2011/03/27](http://kumpulanskripsi.wordpress.com/2011/03/27).

Pasal 104 ayat 11 permendagri 59/2007 tentang Penyampaian Raerda APBD kepada DPRD.

Peraturan Pemerintah No. 105 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah tahun 2000.

Peraturan Pemerintah No. 58 pasal 132 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2005.

Pramita, Yulinda Devi dan Andriyani, Lilik (2010), Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris pada DPRD Se-Karesidenan Kedu), *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIII*, Purwokerto.

Rahman, H. Syah (2007), Hubungan Legislatif Dan Eksekutif Daerah Dalam Proses Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa, *Tesis*, Sekolah Tinggi Ilmu Akuntansi, Makassar, terdapat di [constesis.blogspot.com/2011\\_05\\_01\\_archive.html](http://constesis.blogspot.com/2011_05_01_archive.html).

Rosalina Pebrica Mayasari (2012), Pengaruh Kualitas Anggota Dewan Terhadap Pengawasan APBD Dengan Tata Pemerintahan Yang Baik Sebagai Variabel Moderating, *Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi (Jenius)*, Vol. 2 No. 1, Januari 2012.

Rosseptalia, Rima (2006) Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik, *Tesis*. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, terdapat di [www.docstro.com/docs/skripsi.anggaran](http://www.docstro.com/docs/skripsi.anggaran).

Sinaga, Murbanto (2006), Realita Perencanaan dan Anggaran, *Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi (Jenius)*.

Sopannah (2009), Menguak Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan APBD, *Tesis S2*, Universitas Widyagama, Malang, terdapat di [libraryaccountingdepartment.blogspot.com.2009](http://libraryaccountingdepartment.blogspot.com.2009).

Undang-Undang No. 33 pasal 1 ayat (2) Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah tahun 2004.

Utomo, Hari (2011), Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah(APBD) (Studi Empiris Pada Dprd Kota/Kabupaten Dan Dprd Provinsi Jawa Tengah), *Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi (Jenius)*.

Wahyudi dan Sopanah (2007), Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Di Malang Raya, tersedia di <http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2176584-pengertian-definisi-operasional>.

Werimon *et all* (2007), Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Study Empiris Di Provinsi Papua), *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X*, Makassar.

[www.konsultanstatistik.com/2009/03/uji-heteroskedastisitas-dengan-glejser.html](http://www.konsultanstatistik.com/2009/03/uji-heteroskedastisitas-dengan-glejser.html)

[www.seknafitria.org](http://www.seknafitria.org)

STIE BPD Jateng

# LAMPIRAN 1

**Kuesioner**

STIE BPD Jateneng

## IDENTITAS PENELITI

Saya seorang mahasiswa pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD  
Jateng Semarang, dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Dewi Kurniawati

NIM : 1A.08.1177

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi (S1)

Sekolah : STIE Bank BPD Jateng, Jl. Pemuda No. 4a Semarang

Bermaksud melakukan penelitian mengenai **Pengaruh Hubungan Pihak Eksekutif & Legislatif, Latar Belakang Pendidikan, Indikator Kinerja, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kurangnya Ketepatan Waktu Penyusunan APBD (Studi Kasus Kabupaten Wonosobo)**. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjalani ujian tahap akhir untuk memperoleh gelar Sarjana (S1).

Saya memohon kepada Bapak/Ibu/Saudara untuk bersedia mengisi angket ini sesuai dengan hati nurani Bapak/Ibu/Saudara sendiri, demi kelancaran tugas yang diberikan kepada saya.

Demikianlah atas kerja samanya, tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih.

Peneliti,

( Dewi Kurniawati )



## II. PETUNJUK PENGISIAN

Petunjuk: Berilah tanda (X) pada jawaban yang menurut Anda sesuai dengan fakta atau Anda alami. Pada pengisian kuesioner ini tidak ada jawaban yang benar atau salah.

STS = Sangat Tidak Setuju                      diberi skor 1

TS = Tidak Setuju                                diberi skor 2

N = Netral                                         diberi skor 3

S = Setuju                                         diberi skor 4

SS = Sangat Setuju                             diberi skor 5

<b>Pihak Eksekutif dan Legislatif</b>						
No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Komunikasi yang terjalin di antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan APBD kurang harmonis	1	2	3	4	5
2.	Komunikasi antar anggota SKPD dalam penyusunan APBD tidak berjalan secara efektif	1	2	3	4	5
3.	Pihak eksekutif dan legislatif kurang mampu bekerja sama dengan baik dalam penyusunan APBD	1	2	3	4	5
4.	Pihak Eksekutif lebih mengutamakan kepentingan eksekutif dalam penyusunan APBD	1	2	3	4	5
5.	Pihak Legislatif lebih mengutamakan kepentingan legislatif dalam penyusunan APBD	1	2	3	4	5
6.	Adanya kesenjangan informasi yang dimiliki antar pihak eksekutif dengan legislatif	1	2	3	4	5
7.	Pihak eksekutif dan legislatif belum mampu berkoordinasi secara baik dalam penyusunan APBD	1	2	3	4	5

<b>Latar Belakang Pendidikan</b>						
No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
8.	Minimnya pelatihan dan pendidikan terkait penganggaran keuangan daerah yang diikuti tim penyusun anggaran SKPD	1	2	3	4	5
9.	SKPD kurang memahami secara jelas peraturan perundangan terkait dengan penyusunan APBD	1	2	3	4	5
10.	Minimnya anggota SKPD dengan latar belakang pendidikan yang terkait dengan penyusunan anggaran	1	2	3	4	5
11.	Minimnya anggota dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi	1	2	3	4	5
12.	Kurangnya pelatihan dan pendidikan penganggaran keuangan daerah yang diikuti oleh anggota-anggota dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1	2	3	4	5
13.	Tim Anggaran Pemerintah Daerah belum mengetahui dan memahami secara jelas peraturan perundangan yang menjadi landasan dalam penyusunan APBD	1	2	3	4	5
14.	Minimnya anggota dari Badan Anggaran yang memiliki latar belakang pendidikan terkait penyusunan anggaran	1	2	3	4	5
15.	Badan Anggaran belum mengetahui dan memahami secara jelas peraturan perundangan yang melandasi penyusunan APBD	1	2	3	4	5
16.	Kurangnya pelatihan penganggaran keuangan daerah yang diikuti oleh Badan Anggaran	1	2	3	4	5

<b>Indikator Kinerja</b>						
No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
17.	Kurangnya informasi yang dimiliki pemerintah daerah untuk menentukan indikator kinerja yang diperlukan dalam APBD	1	2	3	4	5
18.	Adanya kesulitan untuk menterjemahkan indikator kinerja ke dalam elemen anggaran	1	2	3	4	5
19.	Pemerintah Daerah sulit mengukur dan menentukan capaian kinerja yang dituju dalam penyusunan APBD	1	2	3	4	5
20.	SKPD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah belum mampu menjalankan koordinasi secara efektif dan efisien dalam penyusunan APBD	1	2	3	4	5
21.	Standar Harga Barang dan Jasa belum memadai	1	2	3	4	5
22.	Masih belum memiliki Analisis Standar Belanja yang jelas	1	2	3	4	5

<b>Komitmen Organisasi</b>						
No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
23.	Unsur SKPD kurang memahami secara jelas visi, misi, sasaran, dan tujuan dari penyusunan APBD	1	2	3	4	5
24.	Pihak Eksekutif dan Legislatif belum sepakat dengan visi, misi, sasaran, dan tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan APBD	1	2	3	4	5
25.	Adanya perubahan peraturan perundangan yang menjadi pedoman penyusunan APBD	1	2	3	4	5
26.	Belum diterapkan secara maksimal Standar Pelayanan Minimal dalam penyusunan APBD	1	2	3	4	5
27.	Belum adanya kemauan yang kuat untuk menerapkan penganggaran secara partisipatif	1	2	3	4	5
28.	Masih besarnya peran faktor politis dalam penyusunan dan penetapan APBD	1	2	3	4	5

<b>Kurangnya Ketepatan Waktu Penyusunan APBD</b>						
No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
29.	Terjadinya keterlambatan penyampaian informasi oleh pemerintah pusat yang diperlukan dalam penyusunan APBD	1	2	3	4	5
30.	Tahapan perencanaan yang terlambat dilaksanakan	1	2	3	4	5
31.	Penentuan tolok ukur jangka waktu yang belum memadai dalam penyusunan APBD	1	2	3	4	5

Dengan tulus saya menghargai waktu dan kerjasama Bapak/Ibu/Sdr/i. Mohon periksa kembali untuk memastikan bahwa anda tidak melewatkan satupun pertanyaan secara tidak sengaja, dan kemudian masukkan kuesioner ini kedalam kotak yang telah ditandai untuk penelitian ini, di koridor departemen Bapak/Ibu/Sdr/i.

Atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

STIE BPPD Jateng

# LAMPIRAN 2

Hasil Kuesioner

STIE BPD Jateng

No.Re sp	Hubungan Pihak Eksekutif dan Legislatif (X1)								Latar Belakang Pendidikan (X2)									Indikator Kinerja (X3)						Komitmen Organisasi (X4)						Kurangnya Ketepatan Waktu Penyusunan APBD						
	Pertanyaan								Pertanyaan									Pertanyaan						Pertanyaan						Pertanyaan						
	1	2	3	4	5	6	7	J ml	1	2	3	4	5	6	7	8	9	J ml	1	2	3	4	5	6	J ml	1	2	3	4	5	6	J ml	1	2	3	J ml
1	4	3	4	4	4	5	5	29	5	4	3	3	3	4	4	4	5	35	4	4	4	5	5	4	26	4	3	4	4	3	3	21	5	3	4	12
2	4	4	4	5	4	4	4	29	4	3	3	4	4	5	4	5	5	37	4	4	5	4	4	3	24	2	4	3	5	5	4	23	4	4	4	12
3	5	4	3	4	4	3	5	28	4	5	4	4	5	5	3	5	5	40	5	5	4	5	3	5	27	3	2	4	4	4	4	21	5	4	4	13
4	4	4	4	5	3	4	3	27	4	4	3	3	5	5	4	3	4	35	5	5	4	3	3	4	24	5	4	4	5	3	3	24	4	4	5	13
5	5	4	4	4	3	4	4	28	5	5	3	4	3	5	3	4	4	36	3	5	5	4	4	4	25	4	4	3	5	4	3	23	5	3	4	12
6	4	5	4	4	3	5	4	29	5	4	3	3	4	3	5	4	4	35	4	4	4	5	4	4	25	3	2	4	4	4	4	21	5	5	5	15
7	3	4	4	5	5	4	4	29	3	4	4	3	5	4	4	2	3	32	3	4	5	4	4	4	24	2	4	5	4	5	5	25	2	5	5	12
8	5	4	5	3	4	4	4	29	3	4	5	4	5	5	5	5	4	40	2	3	4	4	5	4	22	4	4	5	5	3	2	23	4	4	4	12
9	3	4	5	4	2	4	4	26	4	5	5	5	5	4	4	2	3	37	4	5	4	4	4	4	25	3	4	5	4	5	4	25	5	5	5	15
10	4	5	5	2	5	5	4	30	4	5	5	5	5	2	5	4	5	40	4	5	2	2	5	5	23	2	5	5	5	5	4	26	3	3	3	9
11	4	5	5	2	4	5	5	30	4	5	5	5	5	2	5	5	5	41	2	5	4	5	5	5	26	2	5	5	5	5	5	27	4	5	4	13
12	4	5	5	2	5	5	5	31	5	2	5	5	5	4	5	5	5	41	4	5	2	4	5	5	25	2	5	5	4	5	5	26	5	4	4	13
13	2	5	5	2	5	5	4	28	4	5	5	5	5	2	5	5	4	40	4	5	5	4	5	5	28	2	2	5	5	5	5	24	5	4	4	13
14	5	2	5	2	5	5	5	29	5	5	5	5	5	2	5	5	5	42	5	5	5	2	5	5	27	2	4	5	5	5	5	26	4	3	4	11
15	2	2	2	5	5	5	2	23	5	2	5	5	5	5	5	5	5	42	5	5	5	2	5	5	27	2	2	5	5	5	5	24	4	5	4	13
16	2	5	2	5	5	4	4	27	2	4	5	5	5	4	5	4	5	39	5	5	4	5	4	5	28	2	4	5	5	5	5	26	4	4	5	13

17	5	4	4	5	3	4	3	28	5	5	5	4	4	4	4	5	3	39	4	3	4	4	4	4	23	3	3	4	4	3	4	21	3	4	5	12
18	4	4	4	3	4	5	4	28	4	4	5	5	5	4	3	4	4	38	4	4	3	3	4	4	22	4	3	4	3	4	5	23	5	4	4	13
19	5	4	5	5	5	5	4	33	3	4	4	5	4	4	4	4	4	36	4	4	3	3	4	4	22	3	4	3	3	5	5	23	4	4	4	12
20	5	4	4	4	3	4	3	27	4	5	5	5	4	5	4	3	4	39	4	3	3	4	4	4	22	4	3	5	4	3	5	24	4	4	4	12
21	3	4	3	5	5	4	5	29	4	3	4	4	4	4	5	5	5	38	3	5	5	4	5	4	26	5	4	3	4	4	4	24	5	5	4	14
22	5	5	4	5	5	4	5	33	4	5	3	5	5	5	5	5	5	42	4	4	5	5	4	4	26	4	4	4	4	5	4	25	4	5	4	13
23	3	4	4	3	4	5	4	27	4	4	4	3	4	4	5	4	4	36	5	5	4	4	4	5	27	4	4	4	4	4	4	24	4	4	3	11
24	2	4	5	5	5	5	5	31	5	2	5	5	5	5	5	5	5	42	5	5	5	4	5	5	29	2	2	5	5	5	5	24	4	5	5	14
25	2	2	4	5	5	5	5	28	5	2	5	5	5	2	5	5	5	39	5	2	5	4	5	5	26	2	2	5	5	5	5	24	4	4	4	12
26	5	4	5	4	4	5	4	31	4	3	4	4	4	3	5	4	5	36	3	3	3	4	3	4	20	3	2	4	4	3	4	20	4	5	5	14
27	4	5	4	4	4	4	4	29	4	3	4	4	4	3	4	4	4	34	3	3	4	4	3	3	20	3	3	5	3	4	3	21	4	3	5	12
28	2	4	5	5	5	5	5	31	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	2	5	5	2	5	5	24	2	2	5	5	5	5	24	2	2	3	7
29	2	5	2	4	5	5	5	28	5	2	5	5	5	5	5	5	5	42	2	5	5	4	5	5	26	2	2	5	5	5	5	24	4	4	4	12
30	5	5	5	4	5	2	5	31	4	5	5	5	5	5	4	3	4	40	4	4	4	4	4	3	23	2	5	5	3	4	4	23	5	4	5	14
31	5	4	4	4	5	4	5	31	5	4	5	5	4	5	5	5	4	42	2	3	4	4	3	4	20	3	2	4	4	4	4	21	4	4	4	12
32	3	3	3	3	3	2	3	20	4	3	4	3	3	3	2	2	2	26	4	3	3	2	2	3	17	3	2	3	3	2	2	15	5	3	3	11
33	2	4	2	2	2	4	2	18	4	4	4	4	4	2	4	4	2	32	2	4	2	4	2	4	18	4	3	4	4	4	4	23	5	5	5	15
34	3	2	3	3	2	3	3	19	4	3	2	4	4	4	2	4	2	29	2	3	3	2	3	3	16	3	2	3	2	3	3	16	5	4	4	13
35	4	2	2	1	3	4	2	18	2	2	4	3	3	1	4	3	3	25	2	3	2	2	2	4	15	3	2	5	4	4	5	23	4	4	4	12
36	4	4	4	4	4	4	4	28	2	4	4	2	2	2	2	4	2	24	2	2	2	4	3	3	16	4	4	4	4	4	4	24	3	3	2	8
37	3	1	2	1	2	2	1	12	3	2	2	2	2	2	3	2	2	20	2	2	2	1	2	3	12	2	3	2	2	2	3	14	5	4	5	14
38	4	2	2	2	2	2	4	18	2	2	2	4	2	2	4	2	4	24	2	4	2	2	3	2	15	4	2	3	2	3	3	17	4	5	4	13
39	3	1	2	1	3	2	1	13	3	2	2	2	3	2	3	2	2	21	2	3	2	2	2	3	14	3	2	4	4	4	5	22	4	4	5	13
40	3	3	2	3	3	3	2	19	3	3	2	3	2	4	3	3	4	27	3	4	3	2	3	2	17	2	2	3	2	2	3	14	5	4	4	13

# LAMPIRAN 3

**Tabel R Product Moment**

## r Product-Moment

Tabel Harga Kritik dari r Product-Moment

Taraf Signifikansi			Taraf Signifikansi			Taraf Signifikansi		
n	5%	1%	n	5%	1%	n	5%	1%
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
3	0,997	0,999	26	0,388	0,496	55	0,266	0,245
4	0,950	0,990	27	0,381	0,487	60	0,254	0,330
5	0,878	0,059	28	0,374	0,878	65	0,244	0,317
6	0,811	0,917	29	0,367	0,470	70	0,235	0,306
7	0,754	0,874	30	0,361	0,463	75	0,227	0,296
8	0,707	0,874	31	0,355	0,456	80	0,220	0,286
9	0,666	0,798	32	0,349	0,449	85	0,213	0,278
10	0,632	0,765	33	0,344	0,442	90	0,207	0,270
11	0,602	0,735	34	0,339	0,436	95	0,202	0,263
12	0,576	0,780	35	0,334	0,430	100	0,195	0,256
13	0,553	0,648	36	0,329	0,424	125	0,176	0,230
14	0,532	0,661	37	0,325	0,418	150	0,159	0,210
15	0,514	0,641	38	0,320	0,413	175	0,148	0,194
16	0,497	0,623	39	0,316	0,408	200	0,138	0,181
17	0,482	0,606	40	0,312	0,403	300	0,113	0,148
18	0,468	0,590	41	0,308	0,396	400	0,098	0,128
19	0,456	0,575	42	0,304	0,393	500	0,088	0,115
20	0,444	0,561	43	0,301	0,389	600	0,080	0,105
21	0,433	0,549	44	0,297	0,384	700	0,074	0,097
22	0,423	0,537	45	0,294	0,380	800	0,070	0,091
23	0,413	0,526	46	0,291	0,276	900	0,065	0,086
24	0,404	0,515	47	0,288	0,372	1000	0,062	0,081
25	0,396	0,505	48	0,284	0,368			
			49	0,281	0,364			
			50	0,297	0,361			

Sumber : (Burhan Nurgiyantoro, Gunawan dan Marzuki,2004:380)

# **LAMPIRAN 4**

**Hasil Validitas dan Reliabilitas**

STIE BPD Jateneng

## Hubungan Pihak Eksekutif & Legislatif

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	21.1750	20.866	.499	.733
X1.2	20.9750	21.102	.409	.753
X1.3	21.1500	18.592	.625	.702
X1.4	21.1000	19.272	.594	.711
X1.5	21.0250	21.666	.454	.742
X1.6	21.0500	21.741	.445	.744
X1.7	20.9750	22.538	.361	.759

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.765	7

## Latar Belakang Pendidikan

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	29.8250	35.020	.533	.778
X2.2	30.1500	34.849	.396	.794
X2.3	30.0250	35.615	.360	.797
X2.4	29.6500	34.079	.519	.778
X2.5	29.6500	33.823	.471	.784
X2.6	29.8000	33.754	.391	.797
X2.7	29.4250	31.994	.613	.764
X2.8	29.4000	34.144	.484	.782
X2.9	29.4750	30.922	.705	.751

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.801	9

## Indikator Kinerja

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3.1	17.3750	17.676	.633	.739
X3.2	17.2000	19.395	.503	.771
X3.3	17.2500	19.321	.486	.775
X3.4	17.2500	17.833	.664	.732
X3.5	17.2000	19.395	.452	.784
X3.6	16.9750	19.769	.547	.762

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.793	6

STIE BPD Jaleang

## Komitmen Organisasi

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X4.1	16.4250	14.815	.544	.667
X4.2	16.6000	15.785	.386	.712
X4.3	16.5500	14.459	.501	.678
X4.4	17.0750	15.610	.431	.699
X4.5	17.3000	16.062	.376	.714
X4.6	17.8000	14.421	.538	.666

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.728	6

STIE BPD Jaleang

## Kurangnya Ketepatan Waktu Penyusunan APBD

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1.1	9.0250	.999	.408	.770
Y1.2	8.9750	.897	.612	.515
Y1.3	9.0000	.923	.577	.558

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.709	3

STIE BPD Jateng

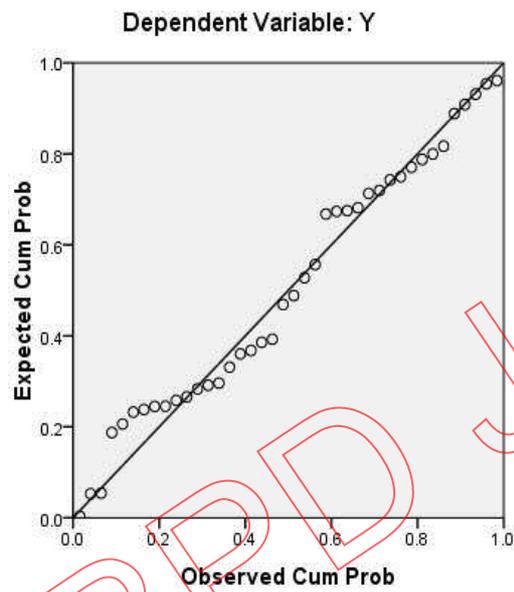
# LAMPIRAN 5

Hasil Uji Normalitas

STIE BPD Jateng

## Charts

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.77163567
Most Extreme Differences	Absolute	.101
	Positive	.088
	Negative	-.101
Kolmogorov-Smirnov Z		.641
Asymp. Sig. (2-tailed)		.805

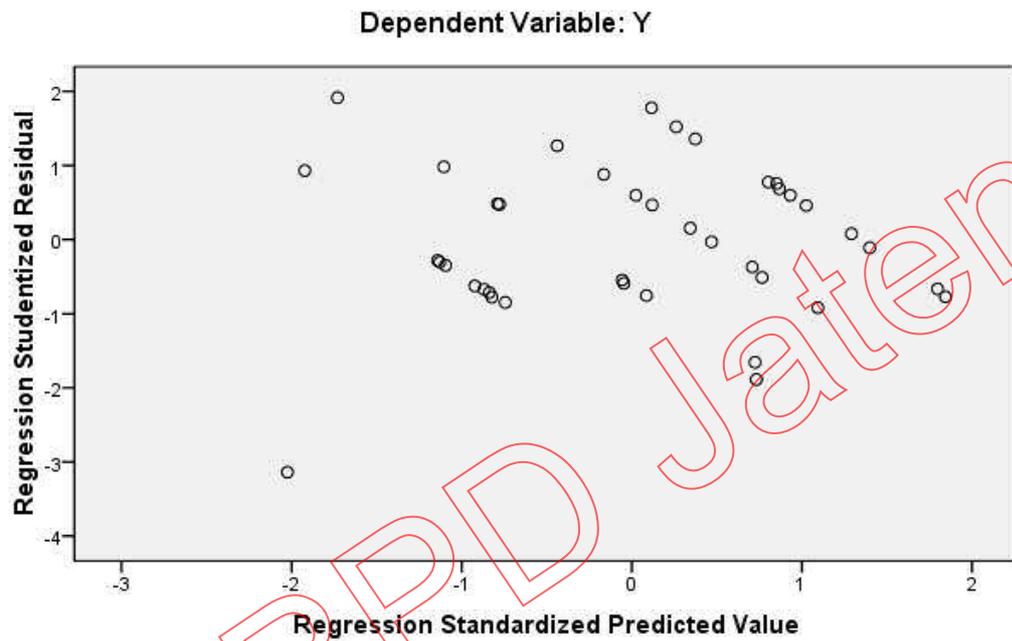
a. Test distribution is Normal.

# **LAMPIRAN 6**

**Hasil Uji Heteroskedastisitas dan Uji Glejser**

## Charts

Scatterplot



Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.806	1.362		-1.326	.193
	X1	.035	.032	.188	1.094	.281
	X2	.040	.032	.220	1.267	.214
	X3	.015	.033	.080	.465	.645
	X4	-.011	.045	-.044	-.252	.803

a. Dependent Variable: Abs\_res

# LAMPIRAN 7

**Hasil Uji Multikolinearitas**

STIE BPD Jateneng

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	34.801	2.491		13.968	.000		
	X1	-.125	.059	-.221	-2.129	.040	.856	1.168
	X2	-.216	.058	-.386	-3.688	.001	.840	1.190
	X3	-.178	.060	-.307	-2.948	.006	.850	1.177
	X4	-.302	.083	-.383	-3.632	.001	.830	1.205

a. Dependent Variable: Y

STIE BPD Jateng

# LAMPIRAN 8

Hasil Regresi Linier

STIE BPD Jateneng

# Regression

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.823 <sup>a</sup>	.677	.641	.81454

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	48.779	4	12.195	18.380	.000 <sup>a</sup>
	Residual	23.221	35	.663		
	Total	72.000	39			

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	34.801	2.491		13.968	.000
	X1	-.125	.059	-.221	-2.129	.040
	X2	-.216	.058	-.386	-3.688	.001
	X3	-.178	.060	-.307	-2.948	.006
	X4	-.302	.083	-.383	-3.632	.001

a. Dependent Variable: Y

# **LAMPIRAN 9**

**Surat Keterangan**

STIE BPD Jateng

# **LAMPIRAN 10**

## **Daftar Riwayat Hidup**

STIE BPD Jateng

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dewi Kurniawati  
Alamat : Badran Rt 01 Rw 03 no. 08 Kranggan, Temanggung  
Tempat Lahir : Temanggung  
Tanggal Lahir : 23 Juni 1990  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Telepon (HP) : 085727290004  
Email : kurniawati.dewi77@yahoo.com

### Pendidikan:

- SD Negeri Badran 1 Temanggung : 1996 - 2002
- SMP Negeri 2 Temanggung : 2002 - 2005
- SMA Negeri 1 Temanggung : 2005 - 2008
- STIE Bank BPD Jateng : 2008 -

Semarang,

Dewi Kurniawati